



PEMERINTAH KOTA BEKASI

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2025 - 2029



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di daerah secara berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah dan cita-cita pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV : Program, Kegiatan Dan Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. Bab V : Penutup.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Dinas Pendidikan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- m. Dinas Sosial;
 - n. Dinas Tenaga Kerja;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Dinas Perhubungan;
 - s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - y. Dinas Tata Ruang;
 - z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - bb. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - cc. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - dd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - ee. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - ff. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid;
 - gg. Kecamatan Bekasi Timur;
 - hh. Kecamatan Bekasi Barat;
 - ii. Kecamatan Bekasi Utara;
 - jj. Kecamatan Bekasi Selatan;
 - kk. Kecamatan Jatiasih;
 - ll. Kecamatan Pondokgede;
 - mm. Kecamatan Bantargebang;
 - nn. Kecamatan Jatisampurna;
 - oo. Kecamatan Rawalumbu;
 - pp. Kecamatan Mustikajaya;
 - qq. Kecamatan Medansatria; dan
 - rr. Kecamatan Pondokmelati.
- (5) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN

NOMOR



Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi untuk periode 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan yang komprehensif dan terukur untuk mencapai visi Kota Bekasi yang **“Nyaman”** dan **“Sejahtera”**.

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota yang terus berkembang pesat, menghadapi berbagai tantangan dalam hal kesatuan bangsa, politik, dan stabilitas sosial. Berbagai isu sosial-politik yang timbul memerlukan perhatian serius agar tercipta harmoni dalam masyarakat yang majemuk dan beragam. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai instansi yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial, kebangsaan, dan politik di Kota Bekasi, dituntut untuk memiliki strategi yang adaptif, responsif, dan berbasis data yang akurat.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi substansi dan dinamika Pemerintah Kota Bekasi saat ini, serta tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Melalui pendekatan yang berbasis pada analisis mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya Kota Bekasi, Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan visi pemerintah daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Selain itu, Renstra ini juga memuat berbagai langkah konkret yang akan diambil oleh Badan Kesbangpol untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kerjasama antar-stakeholder, serta menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Bekasi.

Kami berharap bahwa melalui Rencana Strategis ini, seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dapat bersinergi dan berkomitmen dalam mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik, damai, dan sejahtera. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kami yakin visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi untuk periode 2025-2029 dapat tercapai dengan sukses.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Bekasi.

Billahittaufik wal hidayah,

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Bekasi, 19 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi



Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Diagram.....	vi
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Grafik.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang.....	1
2. Dasar hukum penyusunan	3
3. Maksud dan tujuan	6
4. Sistematika penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI	9
1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	9
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	9
b. Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	11
c. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	15
d. Kelompok sasaran layanan	20
2. Permasalahan, Tantangan dan Peluang serta Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	21
a. Permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	22
b. Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	23
c. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
1. Tujuan dan Sasaran	27
2. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	37
3. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
1. Uraian Program	43
2. Uraian Kegiatan.....	48
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif.....	54
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	70
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	77
BAB V PENUTUP	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Gender.....	11
Tabel 2.2	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Kelompok Usia	12
Tabel 2.3	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Pendidikan.....	13
Tabel 2.4	Aset / Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	15
Tabel 2.5.1	Realisasi Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 (T-C.23).....	16
Tabel 2.5.2	Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 (T-C.24)	19
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan	20
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Badan Kesbangpol Kota Bekasi	22
Tabel 2.8	Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	24
Tabel 2.9	Rumusan Identifikasi Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029	26
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029.....	34
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Inklusi Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029	36
Tabel 3.3	Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029.....	38
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029.....	40
Tabel 4.1	Uraian Kegiatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029	49
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	55
Tabel 4.3	Cascading Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029	73
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029	79

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan RPJMD
Kota, Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor
Lainnya 2

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi10

Bagan 3.1 Korelasi Norma, Standar dan Kriteria (NSPK) Penetapan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi28

Bagan 3.2 Korelasi penetapan Tujuan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengampu Arah Kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih tahun 2025 – 2029.....32

Bagan 4.1 Perjenjangan Program Prioritas RPJMD (Sapta Program Kota Bekasi Keren) dengan Program Langsung Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 202971

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Aparatur Berdasarkan Gender 12

Grafik 2.2 Persentase Aparatur berdasarkan Kelompok Usia 12

Grafik 2.3 Persentase Aparatur berdasarkan Pendidikan 14

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Barat dan bagian dari wilayah metropolitan Jakarta, mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan populasi yang tinggi, urbanisasi yang cepat, serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola dengan bijaksana. Dalam menghadapi berbagai perubahan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, memfasilitasi kerjasama antar lembaga, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk periode 2025-2029 didasari oleh kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah strategis yang adaptif terhadap kondisi Kota Bekasi yang semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan sosial politik yang terjadi, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota semakin beragam, antara lain terkait dengan:

1. Peningkatan Keberagaman dan Toleransi Sosial

Kota Bekasi yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya memerlukan pengelolaan yang efektif agar tercipta kehidupan yang harmonis. Peran Kesbangpol dalam mengelola hubungan antar kelompok dan mencegah potensi konflik sosial sangatlah penting.

2. Pemilu dan Demokrasi Lokal

Sebagai kota dengan pertumbuhan politik yang semakin dinamis, Pemilu dan pilkada di Kota Bekasi memerlukan pengawasan dan pengelolaan yang transparan serta adil. Diperlukan strategi dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mendukung terciptanya pemilu yang aman, damai, dan berintegritas.

3. Tantangan Keamanan dan Ketertiban

Walaupun Kota Bekasi relatif aman, tingkat kriminalitas dan potensi gangguan keamanan selalu ada seiring dengan urbanisasi dan mobilitas yang tinggi. Badan Kesbangpol perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat sistem keamanan serta menjaga ketertiban di tingkat daerah.

4. **Pemberdayaan Politik Masyarakat dan Partisipasi Publik**

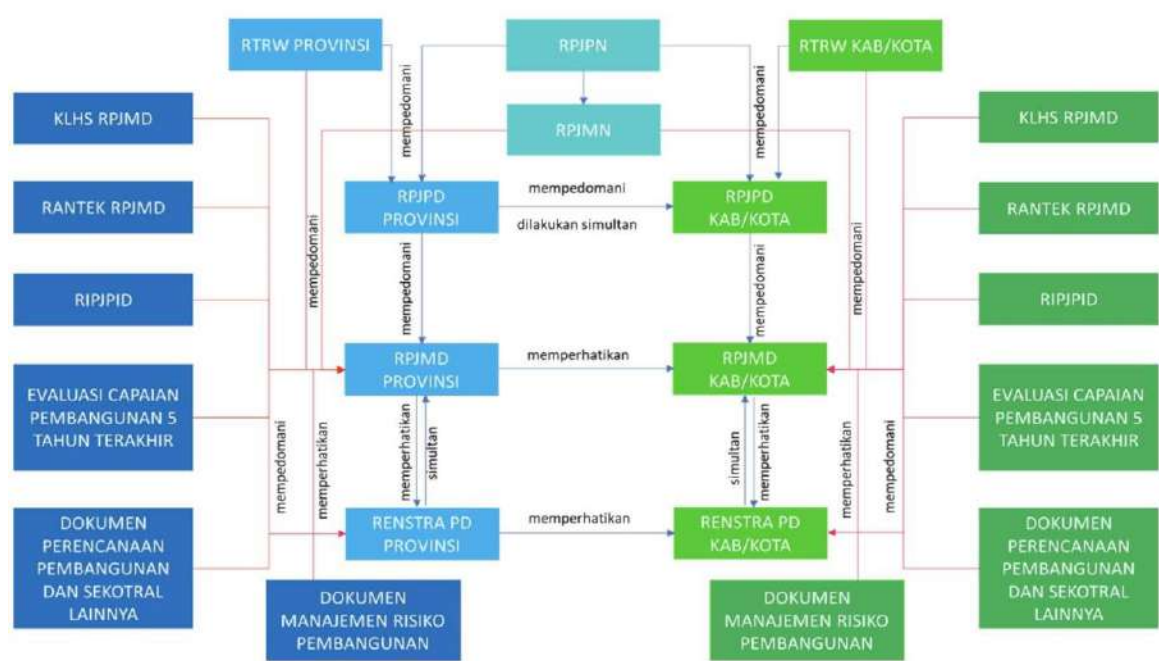
Tingginya partisipasi masyarakat dalam politik menjadi indikator penting dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan literasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan di tingkat lokal harus menjadi prioritas.

5. **Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemimpinan Lokal**

Pembangunan kapasitas organisasi kemasyarakatan dan penguatan kepemimpinan lokal menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu dipacu agar dapat menciptakan ruang bagi inovasi dan inisiatif yang mendukung pembangunan kota yang inklusif.

Dalam rangka mewujudkan visi *Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera*, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode 2025-2029 akan fokus pada penyusunan kebijakan yang adaptif dan berbasis data yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Proses penyusunan dokumen ini melibatkan analisis kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh Kota Bekasi serta peran strategis Kesbangpol dalam memfasilitasi kolaborasi antar sektor dan menjamin keberlanjutan sistem pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Diagram 1
Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan RPJMD Kota, Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya



Sumber : *Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*

Dengan latar belakang tersebut, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029, serta menjadi landasan bagi terciptanya Kota Bekasi yang lebih baik, harmonis, dan demokratis.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2045 (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 129 Seri D);

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2025–2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bekasi periode 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan kelembagaan dalam mewujudkan stabilitas politik dan kehidupan berbangsa yang harmonis di Kota Bekasi. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dan menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta kewaspadaan nasional.

Dengan karakteristik Kota Bekasi sebagai kota strategis yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, dinamika sosial-politik yang berkembang perlu dikelola dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap tantangan aktual, seperti meningkatnya keragaman penduduk, potensi konflik sosial, dan pergeseran nilai-nilai kebangsaan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman operasional untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program kepala daerah, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renstra berfungsi sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memastikan keselarasan kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsi, serta menyediakan kerangka kerja untuk penganggaran dan pelaporan kinerja selama periode lima tahun. Berikut adalah rincian tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah:

1. Operasionalisasi Perencanaan Pembangunan:

Menjadikan Renstra sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, dan menjadikannya sebagai dasar dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Pedoman Penyusunan Rencana Tahunan:

Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahunnya.

3. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja:

Menjadi tolok ukur dan dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah baik pada tingkat tahunan maupun lima tahunan.

4. Wujud Komitmen dan Akuntabilitas:

Menetapkan indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif untuk mewujudkan layanan kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi kontrak kinerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah.

5. Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah:

Memastikan visi, misi, dan agenda kepala daerah terlaksana dengan menjabarkannya ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.

6. Penyesuaian dan Harmonisasi:

Memberikan arahan untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan, serta menyelaraskan tujuan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan nasional.

4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN,

Bab ini menyajikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur Badan Kesbangpol Kota Bekasi, kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan isu-isu strategis dalam pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029;

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tentang masa berlakunya (periodesasi) Renstra dan catatan penting di dalam penyusunan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

1. Tugas dan Fungsi

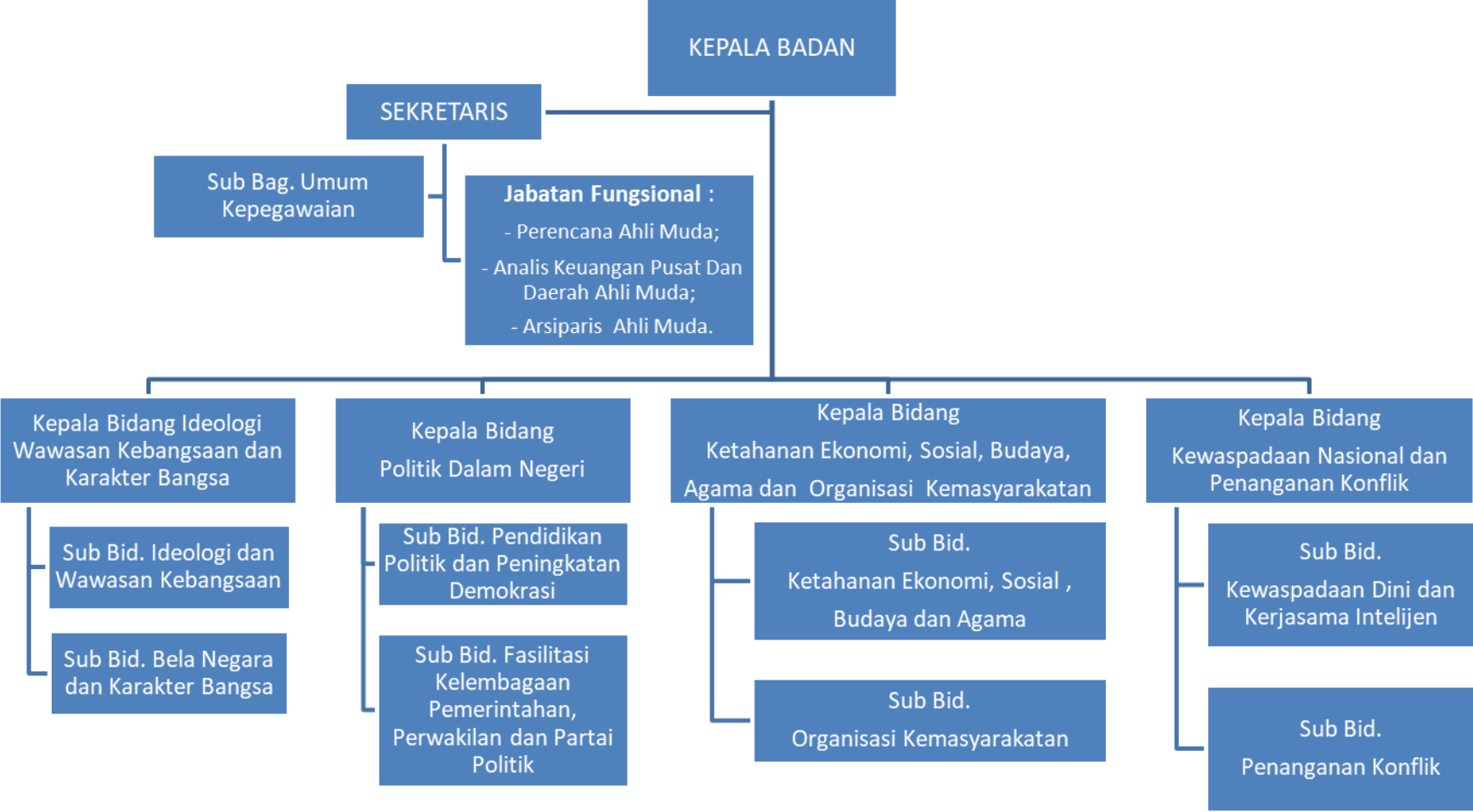
Adapun peranan tugas dan fungsi pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi diantaranya mencakup pada *Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Bidang Politik Dalam Negeri; Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik* di Kota Bekasi.

2. Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI



Sumber : Perwal Kota Bekasi No. 129 / 2021, diolah Bag. Perencanaan.
Pembuat Bagan : 198911172025211040_rachmatsulistiyo

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan struktur perangkat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, 8 (delapan) Ka. Sub Bidang, dan 3 (tiga) Jabatan Fungsional yang terdiri dari 1 (satu) Sub Koord. Perencanaan, 1 (satu) Sub Koord. Keuangan serta 1 (satu) Arsiparis.

b. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, pemetaan dan analisis terhadap sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu komponen penting untuk memastikan perencanaan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan dan kapasitas SDM menjadi faktor penentu utama dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu melakukan pemetaan kompetensi ASN, jumlah pegawai, distribusi jabatan, serta kebutuhan pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa target-target Renstra dapat dicapai secara optimal.

Berdasarkan data kepegawaian pada saat Rencana Strategis ini disusun, diketahui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki aparatur sejumlah 47 Orang. Adapun klasifikasi aparatur sebagai berikut :

a. Klasifikasi Aparatur Menurut Gender

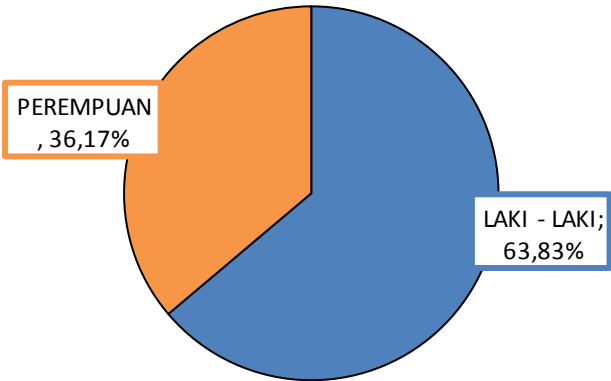
Tabel 2.1

Klasifikasi Aparatur berdasarkan Gender

No	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Gender	Jumlah Aparatur berdasarkan Gender		Persentase
1	Laki – laki	30	Orang	63,83 %
2	Perempuan	17	Orang	36,17 %
	Jumlah Total Aparatur Kesbangpol	47	Orang	100,00 %

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol, diolah Bag. Perencanaan

Grafik 2.1
Persentase Aparatur Berdasarkan Gender



Dari data tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa terkait dengan klasifikasi aparatur berdasarkan gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dengan total jumlah aparatur sebanyak 47 orang, diketahui untuk aparatur berjenis kelamin laki – laki sebanyak 30 orang (63,18%) dan aparatur berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang (36,17%), sehingga dapat disimpulkan bahwa aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi didominasi oleh aparatur berjenis kelamin laki – laki.

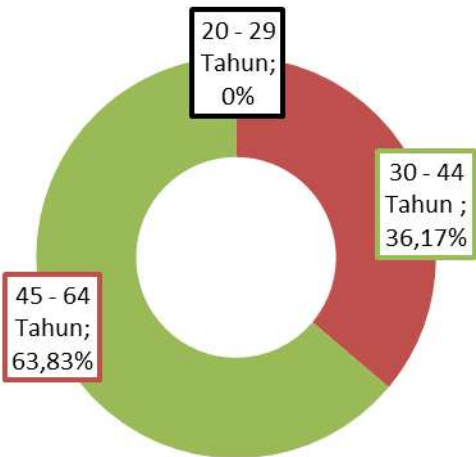
b. Klasifikasi Aparatur Menurut Kelompok Usia

Tabel 2.2
Klasifikasi Aparatur berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Aparatur berdasarkan Usia		Persentase	
1	20 - 29 Tahun	0	Orang	0	%
2	30 - 44 Tahun	17	Orang	36,17	%
3	45 - 64 Tahun	30	Orang	63,83	%
	Jumlah Total Aparatur Bakesbangpol	47	Orang	100,00	%

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol, diolah Bag. Perencanaan

Grafik 2.2
Persentase Aparatur berdasarkan Kelompok Usia



Dari data tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa terkait dengan klasifikasi aparatur berdasarkan kelompok usia dari 47 orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dibagi menjadi 3 (tiga) pengelompokan usia. Diantaranya : Kelompok rentang usia dewasa muda (20 – 29 Tahun), Kelompok rentang usia dewasa tengah (30 – 44 Tahun) dan Kelompok rentang usia dewasa akhir (45 – 64 tahun).

Berdasarkan klasifikasi tersebut diperoleh data bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi hanya terdiri dari 2 (dua) kelompok rentang usia, usia dewasa tengah (30 – 44 Tahun) (36,17%) dan usia dewasa akhir (45 – 64 Tahun) (63,83%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa klasifikasi aparatur berdasarkan kelompok usia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi didominasi oleh usia dewasa akhir (45 -64 Tahun). Sehingga perlu menjadi perhatian khusus terhadap tantangan yang harus dihadapi terkait dengan adaptasi perkembangan teknologi baru, kondisi stamina fisik terhadap beban kerja yang dihadapi dan kondisi psikis terhadap kejenuhan kerja dari rutinitas panjang di birokrasi.

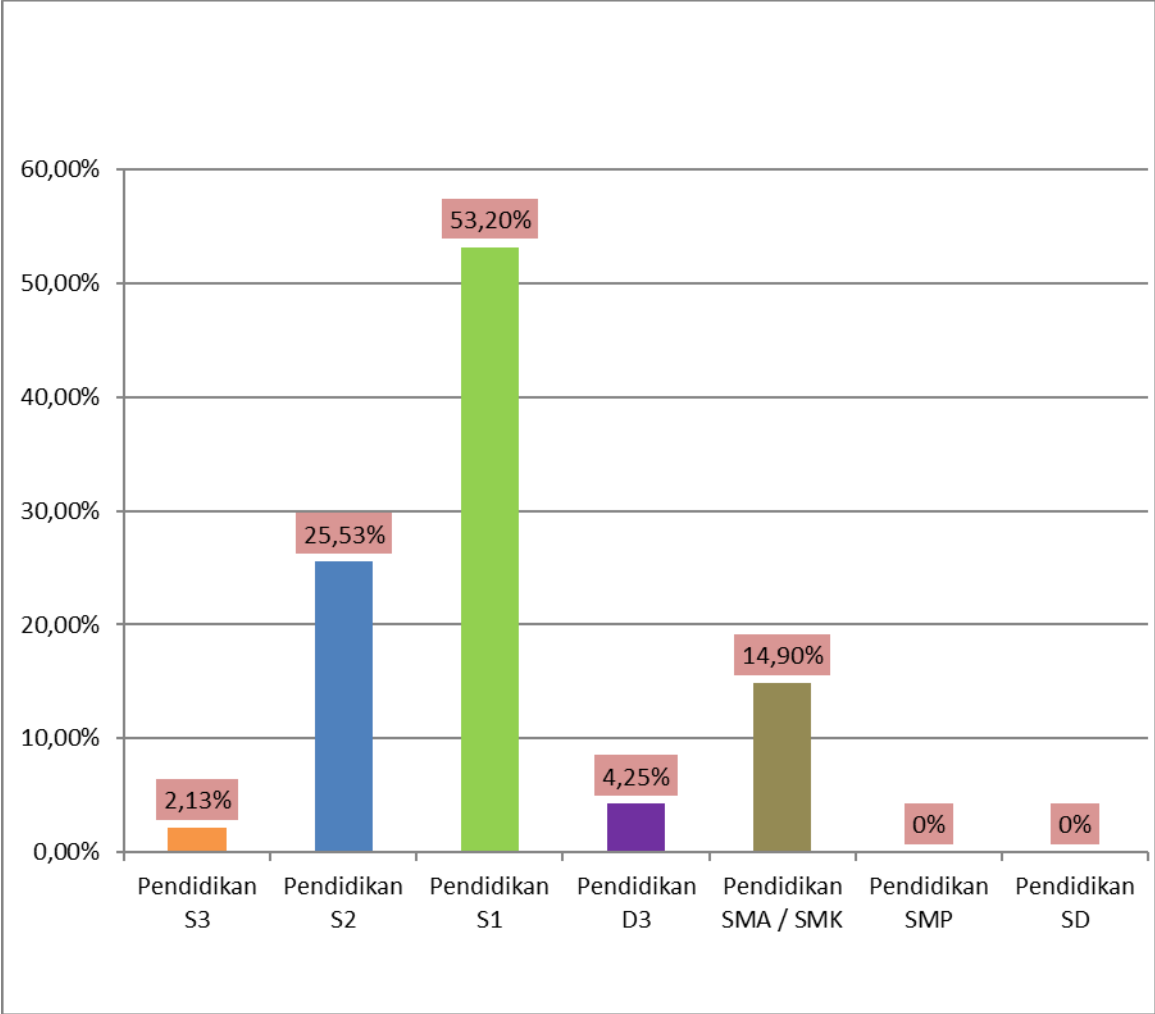
c. Klasifikasi Aparatur menurut Pendidikan

Tabel 2.3
Klasifikasi Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Pendidikan	Jumlah Aparatur berdasarkan Pendidikan	Persentase
1	S3	1 Orang	2,13 %
2	S2	12 Orang	25,53 %
3	S1	25 Orang	53,20 %
4	D3	2 Orang	4,25 %
5	SMA / SMK	7 Orang	14,90 %
6	SMP	- Orang	0,00 %
7	SD	- Orang	0,00 %
	Jumlah Total Aparatur Bakesbangpol	47 Orang	100,00 %

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol, diolah Bag. Perencanaan

Grafik 2.3
Persentase Aparatur berdasarkan Pendidikan



Dari data tabel dan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pemetaan 7 (tujuh) klasifikasi pendidikan, Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki background pendidikan dari mulai Pendidikan SMA/ SMK sampai dengan Pendidikan S3. Pendidikan S1 (Sarjana) merupakan dominasi pendidikan yang paling banyak dengan jumlah 25 orang dari 47 aparatur, sehingga apabila disimpulkan dapat diketahui bahwa berdasarkan klasifikasi pendidikan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi secara optimal, ketersediaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana operasional merupakan aspek krusial yang harus menjadi perhatian. Adapun sumber daya sarana dan prasarana pendukung operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diantaranya :

Tabel 2.4
Aset / Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

No	Jenis Aset / Modal	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	30 Unit	Digunakan
2.	Laptop	7 Unit	Digunakan
3.	Printer	15 Unit	Digunakan
4.	Scanner	1 Unit	Digunakan
5.	Proyektor / Infocus	2 Unit	1 Digunakan, dan 1 rusak
6.	Kendaraan Operasional		
	a. Roda 4 (Mobil)	6 Unit	Kondisi Baik
	b. Roda 2 (Sepeda Motor)	12 Unit	1 unit Rusak Berat

Sumber : KIB-B Data Bag. Umum dan Kepegawaian, diolah Perencanaan

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum masih dapat menunjang operasional organisasi dengan cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa aset yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemeliharaan dan peremajaan, guna memastikan keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi ke depan. Dalam kerangka penyusunan Renstra, penguatan dan optimalisasi sarana prasarana ini menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian target kinerja strategis.

c. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana organisasi mampu menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra), evaluasi terhadap kinerja pelayanan menjadi landasan penting untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan. Adapun realisasi capaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.1
Realisasi Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (T-C.23)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tujuan 1:										
	"Merawat Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Dengan Mengembangkan Aspek Demokrasi, Kebangsaan, dan Kerukunan Serta Keberagaman"										
	Indikator:										
	Persentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Dengan Mengembangkan Aspek Demokrasi, Kebangsaan dan Kerukunan serta Keberagaman Bagi Masyarakat yang Dilaksanakan Kesbangpol Kota Bekasi		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
	Sasaran 1:										
	"Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi" .										
	Indikator 1:										
	Nilai AKIP Kesbangpol		Bb	Bb	Bb	Bb	-	-	Bb	-	-
	1	Program:									
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									
		Indikator Program 1:									
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
		Indikator Program 2:									
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
		Indikator Program 3:									
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
		Indikator Program 4:									
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran 2:										
	Terwujudnya Kerukunan, Toleransi dan Partisipasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kota Bekasi.										
	Indikator:										
	Persentase Kasus SARA yang Diselesaikan		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
	1	Program:									
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
		Indikator Program:									
		Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
	2	Program:									
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									
		Indikator Program:									
		Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
	3	Program:									
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
		Indikator Program:									
		Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
	4	Program:									
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya									
		Indikator Program:									
		Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
	5	Program:									
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial									
		Indikator Program:									
		Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-

Sumber : Data Renstra Teknokratik 2024 – 2026 dan Data LKIP 2024 Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Diolah Bag. Perencanaan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Data yang tersaji merupakan substansi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2024 – 2026 (Renstra Teknokratik);
2. Hasil capaian kinerja indikator Tujuan, Sasaran dan Program memperoleh prosentase sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, artinya dapat disimpulkan bahwa peranan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 telah terlaksana dengan baik dan optimal;
3. Perolehan realisasi capaian indikator sebagaimana pada tabel hanya sampai pada tahun 2024, dikarenakan untuk periode selanjutnya mengikuti arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah atas telah dilantiknya Kepala Daerah terpilih yang baru yaitu Bapak Dr. Tri Adhianto Tjahyono dan Bapak Dr. Abdul Harris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025 – 2029 pada tanggal 20 Februari 2025, sehingga penetapan substansi tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mengikuti arah kebijakan Rencana Pembangunan sesuai Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2025 - 2029.

Dari penjelasan terkait dengan realisasi capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi diatas, berikut merupakan data Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada periode sebelumnya, adapun data sebagai berikut :

Tabel 2.5.2
Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (T-C.24)

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata – Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program											
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	2.290.812.860	2.796.130.000	896.130.000	1.663.360.738			72,61%			-45,89%	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80.942.031.000	80.157.875.000	80.157.875.000	83.219.113.500			102,81%			-0,97%	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	788.962.000			78,90%			36,67%	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.337.400.000	3.337.400.000	3.337.400.000	2.266.420.500			67,91%			0%	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.595.411.700	10.300.000.000	10.900.000.000	7.884.324.500			91,73%			91,8%	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12.232.588.740	13.120.588.740	13.120.588.740	11.091.995.307			90,30%			77%	

Sumber : Data Renstra Teknokratik 2024 – 2026 dan Data LKIP 2024 Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Diolah Bag. Perencanaan

Penjelasan tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 Badan Kesbangpol difokuskan kepada pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada Provinsi serta Kota. Hal ini dapat dilihat dari rasio realisasi anggaran pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang mencapai 102, 81%. Capaian rasio tersebut menunjukkan bahwa terjadi penambahan anggaran pada program di Renja dan DPA 2024 melebihi pagu anggaran indikatif yang terdapat di Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026. Peningkatan anggaran ini adalah bukti nyata dari Pemerintah Kota Bekasi untuk menyukseskan pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada Gubernur serta Wali Kota di Kota Bekasi.

Penambahan anggaran pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik berimplikasi kepada pengurangan pagu anggaran pada program-program lain pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Pada Tahun 2024 terdapat 2 program yang rasio antara realisasi dan anggarannya di bawah 80 persen, yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 72,61 persen dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar 67,91 persen.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi menetapkan kelompok sasaran layanan yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta kehidupan demokrasi dan politik di daerah. Adapun kelompok sasaran layanan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan

No	Kelompok Sasaran	Sasaran Layanan	Keterangan
1.	Masyarakat Umum	Penerima manfaat utama dari terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib dan berlandaskan nilai – nilai Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi.	

No	Kelompok Sasaran	Sasaran Layanan	Keterangan
2.	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), LSM dan Komunitas Masyarakat	Mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban, ketahanan sosial, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Kota Bekasi.	
3.	Partai Politik	Fasilitasi kehidupan demokrasi yang sehat, transparan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan politik di Kota Bekasi.	
4.	Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat	Mitra pemerintah sebagai penggerak dan panutan dalam membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat pada bidang ideologi dan politik dalam pembangunan daerah Kota Bekasi.	
5.	Pelajar dan Mahasiswa	Pembinaan wawasan kebangsaan, nilai demokrasi serta penguatan karakter kebangsaan sebagai generasi penerus bangsa.	
6.	Aparatur Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Koordinasi penanganan konflik sosial, pembinaan ideologi bangsa serta fasilitasi kehidupan politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bekasi.	

Degan sasaran layanan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang adaptif, inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat yang demokratis, harmonis dan berketahanan di Kota Bekasi.

2. Permasalahan, Tantangan dan Peluang serta Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, demokratis serta berlandaskan nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi secara terarah. Perubahan dinamika sosial, politik dan keamanan, baik tingkat lokal, nasional maupun global, menimbulkan sejumlah permasalahan yang berpengaruh terhadap stabilitas daerah.

Dari hal tersebut, maka terkait dengan permasalahan dan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Masalah Pokok	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan	Akar Masalah
Potensi konflik sosial akibat dinamika politik, keberagaman budaya, agama, maupun kepentingan ekonomi	1. Heterogenitas masyarakat Kota Bekasi; 2. Dinamika politik lokal dan nasional; 3. Persaingan kepentingan ekonomi, dan 4. Lemahnya komunikasi lintas elemen masyarakat	Belum optimalnya mekanisme dialog dan koordinasi antar elemen masyarakat serta lemahnya sistem mediasi konflik sejak dini
Rendahnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di masyarakat	1. Minimnya pendidikan politik dan kebangsaan; 2. Kurangnya materi penguatan ideologi di lingkungan pendidikan dan masyarakat, dan 3. Pengaruh media sosial yang tidak terfilter.	Belum maksimalnya program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat
Terbatasnya sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial di tingkat daerah	1. Minimnya sarana prasarana pendukung; 2. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan 3. Rendahnya kapasitas SDM dalam melakukan analisis potensi konflik.	Belum terbangunnya sistem deteksi dini yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah
Lemahnya kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik	1. Rendahnya ketaatan administrasi organisasi; 2. Minimnya transparansi dan akuntabilitas, dan 3. Belum optimalnya peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan daerah.	Belum efektifnya mekanisme pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap Ormas dan Parpol
Partisipasi politik masyarakat belum berkualitas dan berintegritas	1. Rendahnya literasi politik masyarakat; 2. Pengaruh politik uang dan pragmatisme; 3. Kurangnya sosialisasi politik yang mendidik.	Masih rendahnya kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang sehat dan berintegritas
Keterbatasan SDM dan anggaran pada Badan Kesbangpol	1. Jumlah dan kompetensi SDM belum mencukupi, dan 2. Alokasi anggaran relatif kecil dibanding beban tugas.	Keterbatasan dukungan anggaran daerah serta belum optimalnya pengembangan kapasitas aparatur Kesbangpol

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

b. Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Tantangan dan peluang Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada periode 2025-2029 cukup menarik. Berdasarkan data Tahun 2024 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berdomisili di Kota Bekasi sebanyak 2,53 juta jiwa dengan komposisi penduduk sebagai berikut:

- Penduduk usia produktif (15-59 Tahun) sebesar 66,83 persen;
- Penduduk usia anak-anak (0-14 Tahun) sebesar 22,91 persen;
- Penduduk usia lanjut (lebih dari 60 Tahun) sebesar 10,26%.

Jika dilihat dari komposisi suku bangsa, Kota Bekasi juga memiliki corak beragam dan multikultur. Mayoritas suku bangsa yang berada di Kota Bekasi berasal dari Jawa, Sunda, Betawi, Batak dan Minangkabau. Oleh karena itu, keberagaman penduduk yang ada di Kota Bekasi perlu dirawat dengan baik.

Berdasarkan data komposisi penduduk di atas menunjukkan bahwa Kota Bekasi dihuni oleh beragam penduduk yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang harus terpenuhi. Mayoritas penduduk Kota Bekasi berada di usia produktif juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk membutuhkan pekerjaan, sumber pendapatan, dan perlindungan dasar. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan berimplikasi kepada kesenjangan dan kerawanan sosial di Kota Bekasi.

Kesenjangan dan kerawanan sosial merupakan konsekuensi logis jika heterogenitas penduduk tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan kehidupan sosial penduduk perlu dilakukan oleh pemerintah demi menjamin ketertiban sosial di lingkungan hidup. Sehingga, Badan Kesbangpol Kota Bekasi perlu melakukan pemetaan terkait masalah dan isu strategis di Kota Bekasi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan.

Merujuk kepada Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024-2029 menunjukkan bahwa pembangunan “manusia emas” merupakan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang beririsan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi, antara lain:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)- Asta Cita 1;

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan- Asta Cita 7;
- Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur- Asta Cita 8.

Merujuk penjabaran di atas maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi perlu memetakan tantangan dan peluang pelayanan institusi, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

TANTANGAN	
Internal	Eksternal
1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur; 2. Paradigma subjektif terhadap peranan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah; 3. Belum jelasnya kedudukan lembaga Badan Kesbangpol jika merujuk kepada urusan-urusan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 4. Belum tersusunnya fungsional keahlian tertentu di bidang kesatuan bangsa dan politik.	1. Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; 2. Adanya perbedaan budaya yang mengakibatkan ketidakpahaman dan komunikasi antar buday yang memicu konflik sosial; 3. Demokrasi yang berjalan masih procedural; 4. Pemahaman dan ideologi radikal yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.; 5. Potensi <i>hate crime</i> yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
PELUANG	
Internal	Eksternal
- Tersedianya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi; - Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi. - Tersedianya fasilitas bagi sumber daya manusia organisasi untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi;	1. Tersedianya Peraturan yang mengatur tentang peranan, tugas dan fungsi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik (UU.23/2014, Permendagri No. 11 / 2019, Permendagri No.90/2019 dan substansi yang lainnya); 2. Tersedianya Forum Masyarakat yang mendukung peranan tugas dan fungsi Badan Kesataun Bangsa dan Politik di Kota Bekasi, diantaranya : - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 3. Tersedianya lembaga bentukan Pemerintah yang menunjang peranan tugas dan fungsi Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diantaranya : - Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). 4. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, indikator diantaranya : - Adanya Organisasi Kemasyarakatan; - Adanya masyarakat sebagai anggota dan pengurus partai politik; - Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Kota Bekasi (Data BAWASLU).

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 /
BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

c. *Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi*

Berdasarkan Pemetaan permasalahan, pemetaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2025 – 2029 serta adanya tantangan dan peluang yang dihadapi berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, dirumuskanlah identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (Isu Global, Nasional dan Regional) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rumusan Identifikasi Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Cipta kondisi stabilitas dan ketertiban daerah	Permasalahan Ekternal : 1. Dinamika Sosial Politik di Daerah : <i>Potensi konflik sosial akibat dinamika politik, keberagaman budaya, agama maupun kepentingan ekonomi;</i> 2. Ideologi dan Ketahanan Bangsa : <i>Ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Pengaruh Ideologi Transnasional;</i> 3. Organisasi Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat : <i>Masih banyak ditemukannya Ormas/LSM/Komunitas dengan orientasi beragam yang tidak sejalan dengan visi pembangunan daerah (Premanisme, Tindakan anarkis dan tidak tertib administrasi)</i> Permasalahan Internal : 1. Kapasitas Kelembagaan dan SDM : <i>Paradigma subjektif terhadap peranan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah; Keterbatasan jumlah dan kompetensi Aparatur;</i> 2. Sarana dan Prasarana : <i>Fasilitas pendukung pengelolaan data terbatas</i> 3. Perencanaan dan Penganggaran : <i>Keterbatasan alokasi anggaran</i>	Heterogenitas Agama, Etnis dan Budaya : 1. Tingginya potensi Intoleransi dan Konflik SARA; 2. Menurunnya Kohesi Sosial. Ancaman Radikalisme dan Intoleransi : 1. Infiltrasi radikal dan intoleran ke masyarakat; 2. Gangguan Stabilitas Daerah. Dinamika Politik : <i>Potensi Polarisasi Politik dan Konflik Antar Kelompok</i> Aktivitas Ormas yang semakin beragam : 1. Risiko penyalahgunaan kebebasan berserikat; 2. Potensi aksi anarkis dan Pelanggaran Hukum	Perubahan Geopolitik Internasional : <i>Infiltrasi ideologi luar yang tidak sesuai dengan Pancasila;</i> Dinamika Ekonomi Global : <i>Gangguan Stabilitas Politik</i> Arus Globalisasi dan Digitalisasi : Risiko Penyebaran Hoaks, Radikalisme Online dan Propaganda Politik lintas Negara Ancaman Keamanan Non-Tradisional : <i>Terorisme, Siber Crime, Narkotika dan Trafficking (Perdagangan Ilegal)</i>	Implementasi RPJPN 2025 – 2045 dan RPJMN 2025 – 2029 : <i>Penguatan Demokrasi, Ketahanan Ideologi dan Stabilitas Politik Dalam Negeri</i> Meningkatnya potensi konflik horizontal : <i>Isu SARA, Intoleransi, serta polarisasi Politik di masyarakat pasca Pemilu</i> Ancaman Keamanan Non-Tradisional : <i>Terorisme, Siber Crime, Narkotika dan Trafficking (Perdagangan Ilegal)</i>	Perumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat : <i>Potensi gesekan sosial dan konflik kepentingan akibat heterogenitas yang tinggi;</i> Tingginya arus urbanisasi dan Migrasi : <i>Potensi disintegrasi sosial keragaman budaya;</i> Tantangan Ketahanan ideologi di kalangan generasi muda : <i>Potensi arus budaya populer global yang dapat melemahkan nilai – nilai kebangsaan</i> Meningkatnya aktivitas organisasi masyarakat dan kelompok kepentingan : <i>Potensi kerawanan Politik</i>	1. Ketahanan Daerah terhadap Ancaman Radikalisme dan Disintegrasi; 2. Penguatan Wawasan Kebangsaan; 3. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial; 4. Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Politik (Parpol); 5. Peningkatan Partisipasi Politik; 6. Optimalisasi Kapasitas Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi perlu menetapkan arah kebijakan yang terukur, terarah, serta selaras dengan dinamika sosial, politik, dan keamanan di masyarakat. Bab ini menguraikan secara sistematis mengenai tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama periode 2025–2029.

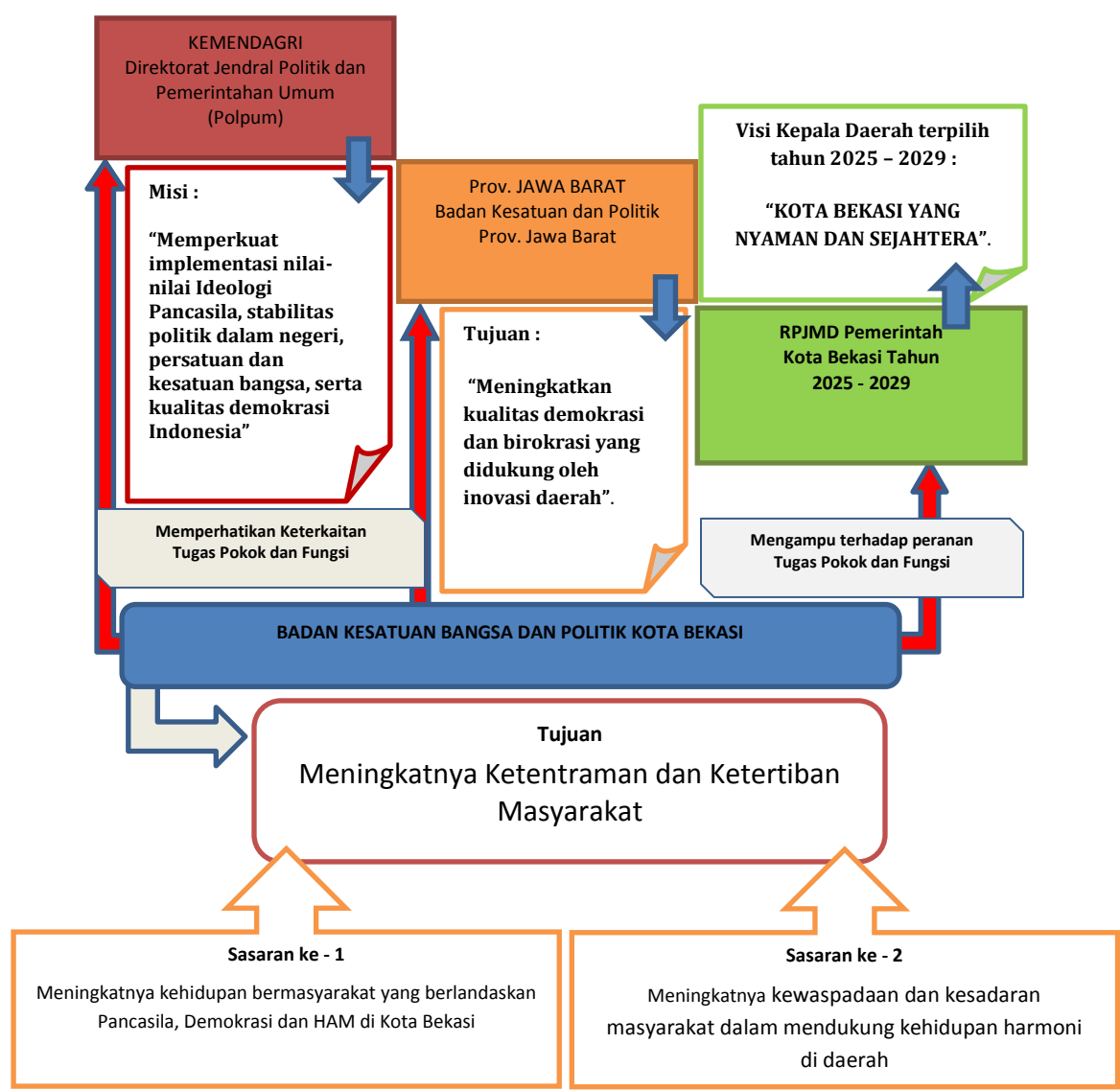
Tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak hanya merupakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat, tetapi juga berangkat dari permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat Kota Bekasi. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu memperkuat ketahanan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah, serta meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di tingkat lokal.

Melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan ini, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjadi perangkat daerah yang adaptif, responsif, dan proaktif dalam mengantisipasi berbagai tantangan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan penentuan tujuan dan sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi melaksanakan telaahan terhadap korelasi rencana pembangunan yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan (Periode : Tahun 2025 – 2029) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan menetapkan tujuan arah capaian pembangunan yang ingin diwujudkan sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi, adapun penjelasan sebagai berikut :

Bagan 3.1.
Korelasi Norma, Standar dan Kriteria (NSPK) Penetapan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi



Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan dan sasaran, diantaranya :

- Tujuan : *“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”*
- Sasaran ke – 1 : *“Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi”.*
- Sasaran ke – 2 : *“Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah”.*

Berdasarkan keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memperhatikan rencana pembangunan instansi sektoral lainnya, diantaranya :

1. Telaahan Rencana Strategis Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan unit eselon I di lingkungan Kemendagri yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam *perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan pemerintahan umum*.

Secara umum, Ditjen Polpum berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya :

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait *politik dalam negeri*, termasuk *pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan demokrasi*.
- Menyelenggarakan *pemerintahan umum*, meliputi kewenangan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan pemerintahan daerah maupun instansi vertikal di daerah.
- Melaksanakan *koordinasi, pembinaan, serta pengawasan* terkait penyelenggaraan politik dan pemerintahan umum.
- Memberikan *fasilitasi dan pembinaan* kepada pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta komponen bangsa lainnya agar tercipta stabilitas politik dan ketahanan negara.

Dari penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Ditjen Polpum merupakan ujung tombak Kemendagri dalam menjaga dan mengelola dinamika politik dalam negeri serta mendukung terselenggaranya pemerintahan umum yang kondusif, demokratis, dan berlandaskan pada Pancasila serta UUD 1945.

Berdasarkan dokumen Renstra Ditjen Polpum Kemendagri dijelaskan bahwa misi dari Ditjen Polpum adalah ***“Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kualitas demokrasi Indonesia.”*** Atas dasar misi beserta substansinya inilah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi memperhatikan keselarasan arah rencana pembangunan sebagai alur yang dituju dalam pembangunan yang ada di Kota Bekasi.

2. **Telaahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode 2025–2029, dilakukan telaahan terhadap dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman serta acuan sinkronisasi arah kebijakan. Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan partisipasi politik masyarakat, ketahanan wilayah, serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yaitu dengan menetapkan tujuan **“Meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah”** dalam mendukung tercapainya Sasaran ke – 2 RPJMD Provinsi Jawa Barat **“Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta keadilan Hukum dan Demokrasi yang berkualitas”** yang mengampu terhadap tercapainya Misi ke – 4 (empat) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat periode 2025 – 2029 **”Mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, serta sesuai dengan prinsip *good and clean governance*”** dalam mensukseskan Visi **“Jabar Istimewa”**.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa berdasarkan keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mencerminkan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi yang selaras terkait dengan memperkuat demokratisasi dan ketahanan nasional di daerah.

3. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Bekasi periode 2025 – 2029**

Berdasarkan telah terpilihnya pasangan Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Haris Babihoe sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2025 – 2029 yang memiliki arah kebijakan pembangunan dengan Visi : **“KOTA BEKASI YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA”**. Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, diperlukan perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada

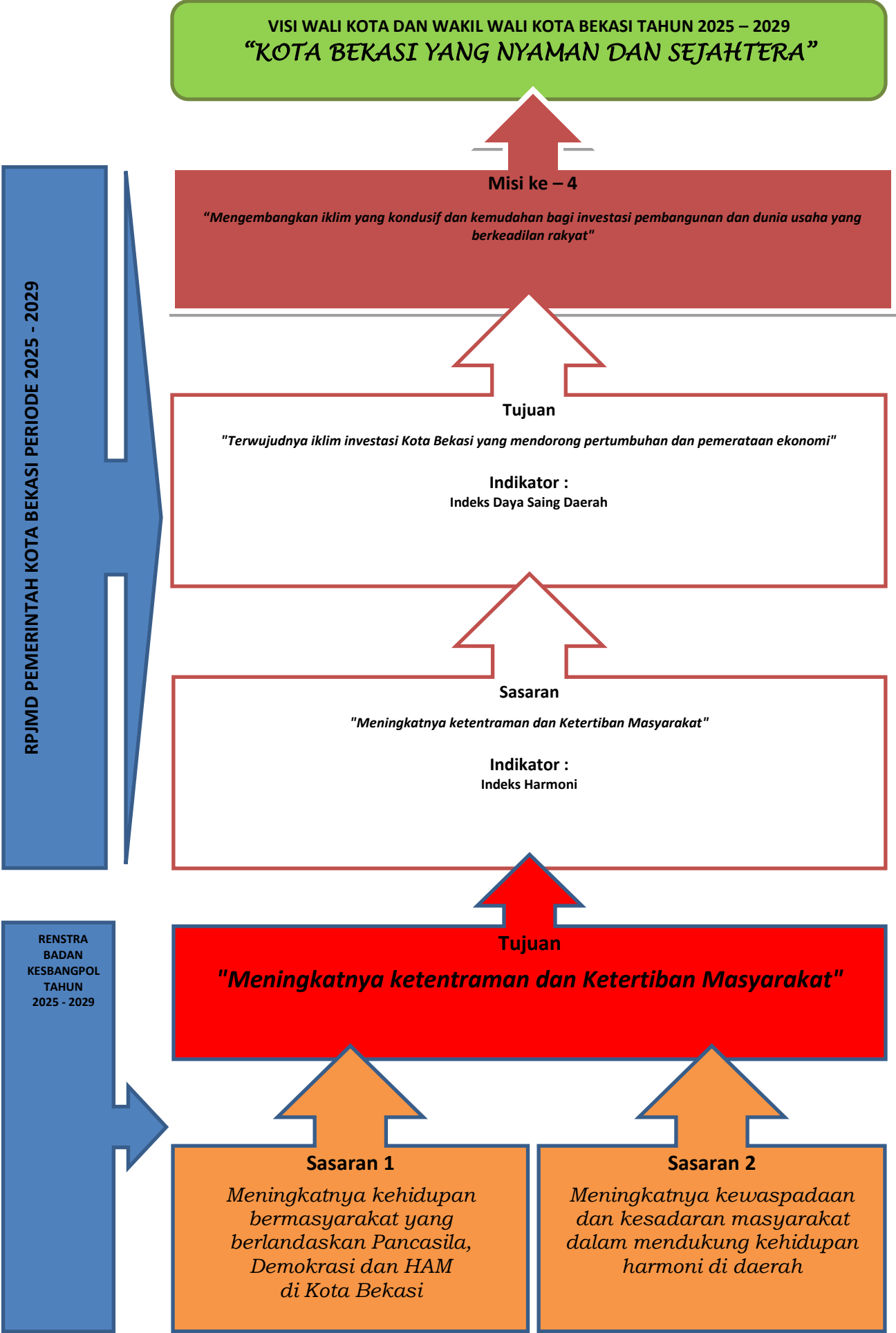
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang jelas dan terukur juga berkesinambungan.

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, diketahui terdapat 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah, diantaranya :

- 1) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
- 3) Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreatifitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
- 5) Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, peran dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi, atas dasar inilah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mengampu peranan tugas dan fungsi dalam mensukseskan tercapainya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025 – 2029. Adapun Korelasi Norma, Standar dan Kriteria (NSPK) Penetapan Tujuan dan Sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan 3.2
Korelasi penetapan Tujuan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengampu Arah Kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih tahun 2025 - 2029



Sumber : Dokumen Cascade Badan Kesbangpol periode tahun 2025 – 2029, diolah Bag. Perencanaan
Pembuat Bagan : 198911172025211040_rachmatsulistiyo

Dari bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tujuan rencana strategis dalam mensukseskan arah kebijakan rencana pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode terpilih tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan dan sasaran rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam penyusunan Renstra tahun 2025 – 2029 memiliki Indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 : "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat". Indikator Sasaran : "Indeks Harmoni" Target : 1. Tahun 2025 : 6,47 2. Tahun 2026 : 6,48 3. Tahun 2027 : 6,49 4. Tahun 2028 : 6,51 5. Tahun 2029 : 6,53 6. Tahun 2030 : 6,55	<i>"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat".</i>		<i>"Indeks Harmoni"</i>	6,47	6,48	6,49	6,51	6,53	6,55	
		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73	
		Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2029 adalah *“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”* yang selaras dengan Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang dengan indikator *“Indeks Harmoni”*. Adapun dalam pengukuran kinerja Indeks Harmoni ini mengacu terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor : 400.4.7/e-170/Polpum tanggal 25 Februari 2025 tentang Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Tahun 2025, yang dalam pengukurannya diukur dari 4 (empat) dimensi, yaitu : Dimensi Ekonomi (Skor 30%), Dimensi Sosial (Skor 23%), Dimensi Budaya (Skor 22%) dan Dimensi Religius / Keberagaman (Skor 25%), dengan 8 (delapan) variabel dan 40 (empat puluh) indikator, yang pelaksanaan pengukurannya melalui e-Survey Riset Publik (Surat Terlampir).
2. Sasaran Strategis ke – 1 adalah *“Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi”* dengan Indikator *“Inklusi Sosial”*. Adapun maksud dan tujuan, menetapkan sasaran rencana strategis ini dengan menggunakan Indikator *“Inklusi Sosial”* adalah untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkup peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Dalam perhitungan perolehan capaian kinerja, adapun dimensi pengukuran dinilai dari substansi aspek , diantaranya : (1) *Akses dan Kesetaraan Layanan Publik*, (2) *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi*, serta (3) *Toleransi dan kehidupan Harmonis Antarwarga di Kota Bekasi*, adapun penjelasan sebagai berikut :
 - (1) *Akses dan Kesetaraan Layanan Publik*, dimensi ini diukur dari tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memfasilitasi terkait dengan pelayanan terhadap kelompok rentan (difabel, lansia, perempuan, dan kelompok minoritas) yang merasa terlayani secara setara. Adapun sumber data diperoleh dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang tersedia pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi melalui Aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi (<https://sisukma.bekasikota.go.id/>).

- (2) *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi*, dimensi ini diukur dari jumlah / proporsi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Politik dan Pemilu yang tercatat / dilaporkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
- (3) *Toleransi dan kehidupan Harmonis Antarwarga*, dimensi ini didapatkan dari hasil *Indeks Kota Toleran* (IKT) Indonesia yang dirilis oleh SETARA Institute.

Setiap dimensi diukur melalui kombinasi data kuantitatif (Partisipasi Akses) dan Data Kualitatif (Hasil Survei Presepsi). Setiap dimensi dinormalisasi dalam Skala 1 – 10, lalu dirata – ratakan untuk mendapatkan Nilai Indeks Inklusi Sosial Tahunan. Adapun rumusan pengukuran / formulasi Indikator Inklusi Sosial (IIS) sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Skor Akses} + \text{Skor Partisipasi} + \text{Skor Toleransi}}{3}$$

Berdasarkan penetapan indikator tersebut, maka merujuk terhadap penentuan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Inklusi Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

No	Tahun	Target (Indeks)	Dimensi Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1	2025	7,63	1. Akses dan Kesetaraan Layanan Publik; 2. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi; 3. Toleransi dan kehidupan Harmonis Antarwarga	• Survei presepsi masyarakat / Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); • Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi yang tercatat pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi; • Data Indeks Kota Toleran (IKT)	Perhitungan awal Indeks, baseline ditetapkan tahun 2025
2	2026	7,65			
3	2027	7,67			
4	2028	7,69			
5	2029	7,71			
6	2030	7,73			

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

3. Sasaran Strategis ke - 2 adalah “Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah” dengan indikator “Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan”. Berdasarkan pengukuran kinerja indikator ini memfokuskan terhadap bagaimana peranan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memfasilitasi penanganan terhadap konflik yang diterima atau yang dilaporkan, sehingga dalam formulasi rumusan pengukuran kinerja sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode 2025 – 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Sesuai amanat tersebut, strategi memegang peranan penting sebagai jembatan antara tujuan dan sasaran dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah.

Strategi yang dirumuskan tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga menjadi kerangka kerja yang menyatukan langkah-langkah Badan Kesbangpol dalam menjawab isu strategis, tantangan, serta dinamika lingkungan sosial politik daerah. Dengan prinsip *holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS)*, strategi diarahkan untuk memperkuat stabilitas daerah, meningkatkan kualitas demokrasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, serta membangun ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan.

Oleh karena itu, penyusunan strategi dalam Renstra ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sasaran dapat dicapai secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan. Adapun Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran periode tahun 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3				
Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029				
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8); - Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); - Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial; - Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan - Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8); -Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); -Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial; -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan -Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8).; -Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); -Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (difokuskan kepada pra Pemilu); -Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (difokuskan kepada pra Pemilu); -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional/ PN 8).; -Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); -Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (difokuskan kepada saat dan Pasca Pemilu); -Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (difokuskan kepada saat dan Pasca Pemilu); -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8).; -Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); -Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (difokuskan kepada pra Pemilu); -Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (difokuskan kepada pra Pemilu); -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

3. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka melaksanakan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, diperlukan arah kebijakan yang terukur, konsisten, dan relevan dengan dinamika lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Arah kebijakan menjadi pedoman utama dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi selama periode 2025–2029, sehingga setiap langkah pembangunan yang dilakukan senantiasa berorientasi pada pencapaian kinerja yang optimal.

Arah kebijakan ini juga disusun sebagai respons atas tantangan dan peluang yang muncul, baik yang bersumber dari faktor internal kelembagaan maupun eksternal yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu memperkuat peran

Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagai fasilitator, mediator, serta katalisator dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang harmonis dan inklusif. Adapun arah kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PEMERINTAH KOTA BEKASI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Norma : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah (Beserta Pemutakhirannya); Inmendagri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Standar : - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); - Indeks Harmoni Indonesia (IHI). Prosedur : - SOP pelaksanaan teknis Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; - SOP pelaksanaan teknis Bidang Politik Dalam Negeri; - SOP pelaksanaan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;	Peningkatan Kondusivitas kota untuk mendukung Iklim Investasi	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kota Bekasi, dalam bentuk pelaksanaan : Fasilitasi Pendidikan Bela Negara, Fasilitasi Pendidikan Konsepsi Wawasan Kebangsaan, Fasilitasi pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kota Bekasi.; 2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik di Kota Bekasi, dalam bentuk pelaksanaan : Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat, Fasilitasi bantuan dana hibah bagi lembaga pemerintah (KPU dan BAWASLU), Fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Izin Penelitian (SKIP), Fasilitasi bantuan keuangan bagi anggota Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PEMERINTAH KOTA BEKASI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- SOP pelaksanaan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Kriteria : - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; - Meningkatnya etika dan budaya politik; - Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan; - Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; - Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan.		berkenaan dengan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik di Kota Bekasi.; 3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dalam bentuk pelaksanaan : Fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan, Fasilitasi bantuan keuangan bagi Ormas bentukan Pemerintah dan Ormas Independen masyarakat, Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Ormas, dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.; 4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam bentuk pelaksanaan : Fasilitasi Sinergitas Tokoh Masyarakat Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah, Fasilitasi pencegahan pemberantasan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PEMERINTAH KOTA BEKASI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Fasilitas Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah dan Fasilitas substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi.; 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dalam bentuk pelaksanaan : Fasilitas FORKOPIMDA Kota Bekasi, Fasilitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi (FKDM, TNI, POLRI, KEJAKSAAN, BINDA, IMIGRASI, dll), Fasilitas penerbitan Surat Tanda Laport (STL) Orang Asing dan dan Fasilitas substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial di Kota Bekasi.	

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025 – 2029

Pada bab ini memuat arah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam kurun waktu 2025–2029. Perumusan program dan kegiatan dilakukan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, sehingga pelaksanaannya memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian target pembangunan daerah maupun dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam dokumen Renstra ini berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan stabilitas politik, memperkuat kerukunan masyarakat, menumbuhkan kesadaran bela negara, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memperkuat ketahanan bangsa di Kota Bekasi. Oleh karena itu, setiap program diarahkan agar memiliki keluaran (output) dan hasil (outcome) yang terukur, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu menjawab tantangan strategis baik dari faktor internal kelembagaan maupun dinamika eksternal masyarakat.

Dengan adanya perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis, Badan Kesbangpol Kota Bekasi diharapkan dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara lebih efektif, akuntabel, dan sinergis. Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk mengoptimalkan sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan Kota Bekasi yang aman, harmonis, dan berkelanjutan.

1. Uraian Program

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mengampu terhadap Urusan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik. Adapun Program pembangunan yang dilaksanakan, diantaranya :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari 6 (enam) program strategis ini, maka dapat dijelaskan uraian Program sebagai berikut :

1. *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* merupakan program dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan bangsa. Melalui pendidikan, kegiatan dialog, serta pembinaan generasi muda, program ini mendorong agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang berkarakter, toleran, serta mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Diketahui hasil (outcome) program ini adalah “*Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*” dengan indikator kinerja “*Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*”, adapun formulasi rumusan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Pembinaan} \\ \text{Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG)} \\ \text{Nasionalisme NKRI yang ditangani}}{\text{Jumlah Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG)} \\ \text{Nasionalisme NKRI yang tercatat pada Badan Kesbangpol}} \times 100 \%$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam terpenuhinya indikator kinerja ditentukan dari bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, khususnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa memfasilitasi pembinaan terhadap adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Nasionalisme NKRI di Kota Bekasi.

2. *Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik* merupakan Program yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas partai politik dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, dialog politik, pengkaderan, serta pengembangan etika dan budaya politik yang sehat, program ini bertujuan membangun kesadaran politik yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan tercipta kehidupan politik yang demokratis, berintegritas, serta berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan keadaban publik. Diketahui hasil (outcome) program ini adalah “*Meningkatnya etika dan budaya politik*” dengan indikator kinerja “*Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik*”, adapun formulasi rumusan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pendidikan Politik pada Kader Partai}}{\text{Jumlah Kader Partai periode terpilih}} \times 100 \%$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam terpenuhinya indikator kinerja ditentukan dari bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, khususnya Bidang Politik Dalam Negeri memfasilitasi pendidikan Politik bagi Kader Partai periode terpilih di Kota Bekasi.

3. *Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah sekaligus memastikan penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pembinaan, fasilitasi, pendampingan, serta pengawasan yang terarah, program ini diharapkan dapat menciptakan organisasi kemasyarakatan yang produktif, akuntabel, dan berdaya guna. Dengan demikian, ormas mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat persatuan, menjaga

ketertiban sosial, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Diketahui hasil (outcome) program ini adalah *“Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan”* dengan indikator kinerja *“Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif”*, adapun formulasi rumusan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan aktivitas pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi}}{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan terdaftar atau tercatat pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi}} \times 100 \%$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam terpenuhinya indikator kinerja ditentukan dari bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, khususnya Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar atau tercatat di Kota Bekasi yang melaporkan aktivitas kegiatannya.

4. *Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya* bertujuan untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman, tantangan global, serta berbagai potensi kerentanan di tingkat lokal. Melalui pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kemandirian, kreativitas, serta daya saing dalam berbagai sektor produktif. Pada aspek sosial, program ini diarahkan untuk membangun solidaritas, kebersamaan, dan kohesi sosial yang kokoh, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, inklusif, dan toleran. Sementara itu, pengembangan ketahanan budaya difokuskan pada pelestarian nilai-nilai luhur bangsa, penguatan jati diri, serta adaptasi budaya yang selaras dengan perkembangan teknologi dan modernisasi. Dengan sinergi ketiga aspek tersebut, program ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

Diketahui hasil (outcome) program ini adalah *“Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat”* dengan indikator kinerja *“Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat*

kepercayaan di daerah yang dilaksanakan”, adapun formulasi rumusan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Fasilitas Pembinaan Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang ditangani}}{\text{Jumlah Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang tercatat pada Badan Kesbangpol}} \times 100 \%$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam terpenuhinya indikator kinerja ditentukan dari bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, khususnya Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi terkait dengan pembinaan penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang diterima / dilaporkan di Kota Bekasi.

5. *Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial*, merupakan program yang disusun untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Melalui peningkatan kewaspadaan nasional, masyarakat dan aparaturnya didorong untuk lebih peka, responsif, serta sigap dalam mengantisipasi dinamika situasi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Sementara itu, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial diarahkan pada upaya pencegahan, mediasi, dan resolusi konflik secara cepat, tepat, dan berkeadilan, guna meminimalisir dampak negatif yang dapat mengganggu kerukunan hidup bermasyarakat. Dengan adanya sinergi kedua program ini, diharapkan tercipta kondisi daerah yang aman, tertib, harmonis, serta kondusif bagi kelancaran pembangunan dan terjaganya persatuan serta kesatuan bangsa.

Diketahui hasil (outcome) program ini adalah “*Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan*” dengan indikator kinerja “*Persentase konflik sosial yang diselesaikan*”, adapun formulasi rumusan pengukuran kinerja sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang ditangani}} \times 100 \%$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam terpenuhinya indikator kinerja ditentukan dari bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, khususnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memfasilitasi terkait dengan penyelesaian konflik sosial yang ditangani.

6. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota* merupakan upaya strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini berfungsi sebagai penopang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dengan menitikberatkan pada penyediaan dukungan manajemen, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem kerja kelembagaan.

Dengan demikian, program ini memiliki peran penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program - program substantif Kesbangpol yang berhubungan langsung dengan penguatan persatuan, demokrasi, politik, dan ketahanan masyarakat di Kota Bekasi. Diketahui hasil (outcome) program ini adalah *“Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”* dengan indikator kinerja *“Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”*.

2. Uraian Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merumuskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Uraian kegiatan ini menjadi pedoman operasional dalam mengimplementasikan program-program prioritas, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Setiap kegiatan yang disusun berorientasi pada pencapaian sasaran strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1

Uraian Kegiatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						KETERAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
		Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
		Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
		Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Jumlah laporan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

[illegible]

3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan, maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025–2029 perlu dilengkapi dengan uraian sub kegiatan secara rinci. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasional yang akan ditempuh dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Sub kegiatan disusun sebagai bentuk penjabaran lebih detail dari kegiatan yang ada, sehingga mampu menguraikan indikator kinerja, sasaran target, serta mekanisme pelaksanaan yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaan sub kegiatan tidak hanya menjadi instrumen teknis semata, tetapi juga menjadi acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan.

Melalui uraian sub kegiatan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga kondusivitas wilayah dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun uraian Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang mendukung terhadap capaian kegiatan dan Program yang disertai dengan pendanaan pagu indikatif tahun 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik															
Program 1 : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Outcome (Hasil) : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	100%	1.653.737.300	100%	1.885.499.300	100%	1.983.168.164	100%	2.097.398.650	100%	2.204.785.461	100%	2.322.961.962	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	2 Sub Kegiatan	1.653.737.300	4 Sub Kegiatan	1.885.499.300	4 Sub Kegiatan	1.983.168.164	4 Sub Kegiatan	2.097.398.650	4 Sub Kegiatan	2.204.785.462	4 Sub Kegiatan	2.322.961.963	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.620 Orang	85 Orang	500.000.000	200 Orang	50.000.000	230 Orang	52.590.000	280 Orang	55.619.184	300 Orang	58.466.886	300 Orang	61.600.711	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Output (Keluaran) : Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	N/A	0 Orang	-	90 Orang	500.000.000	100 Orang	525.900.000	120 Orang	556.191.840	150 Orang	584.668.862	150 Orang	616.007.113	
Sub Kegiatan 3 : Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Output (Keluaran) : Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	N/A	0 Dokumen	-	2 Dokumen	181.762.000	1 Dokumen	191.177.272	1 Dokumen	202.189.082	1 Dokumen	212.541.164	1 Dokumen	223.933.371	
Sub Kegiatan 4 : Pembentukan Paskibraka Output (Keluaran) : Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	N/A	52 Orang	1.153.737.300	52 Orang	1.153.737.300	60 Orang	1.213.500.892	60 Orang	1.283.398.544	60 Orang	1.349.108.549	60 Orang	1.421.420.767	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Program 2 : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Outcome (Hasil) : Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	N/A	100%	9.957.582.000	100%	10.287.880.000	100%	10.820.792.184	100%	11.444.069.814	100%	12.030.006.188	100%	12.674.814.520	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	N/A	2 Sub Kegiatan	9.957.582.000	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000	2 Sub Kegiatan	10.820.792.184	2 Sub Kegiatan	11.444.069.814	2 Sub Kegiatan	12.030.006.188	2 Sub Kegiatan	12.674.814.520	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	21 Dokumen	11 Dokumen	9.868.672.000	11 Dokumen	9.937.880.000	11 Dokumen	10.452.662.184	11 Dokumen	11.054.735.526	11 Dokumen	11.620.737.984	11 Dokumen	12.243.609.541	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400 Orang	40 Orang	88.910.000	1.500 Orang	350.000.000	500 Orang	368.130.000	500 Orang	389.334.288	500 Orang	409.268.204	1.000 Orang	431.204.979	
Program 3 : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Outcome (Hasil) : Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	N/A	70%	9.779.956.500	71%	5.850.000.000	72%	6.153.030.000	73%	6.507.444.528	74%	6.840.625.688	75%	7.207.283.225	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	N/A	2 Sub Kegiatan	9.779.956.500	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000	2 Sub Kegiatan	6.153.030.000	2 Sub Kegiatan	6.507.444.528	2 Sub Kegiatan	6.840.625.688	2 Sub Kegiatan	7.207.283.225	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	52 Dokumen	9.300.000.000	5 Dokumen	5.750.000.000	5 Dokumen	6.047.850.000	6 Dokumen	6.396.206.160	5 Dokumen	6.723.691.916	5 Dokumen	7.084.081.802	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	200 Orang	479.956.500	100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.180.000	150 Orang	111.238.368	100 Orang	116.933.772	150 Orang	123.201.423	
Program 4 : Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Outcome (Hasil) : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	N/A	100%	1.066.848.000	100%	377.820.900	100%	397.392.023	100%	420.281.803	100%	441.800.231	100%	465.480.724	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	N/A	1 Sub Kegiatan	1.066.848.000	1 Sub Kegiatan	377.820.900	1 Sub Kegiatan	397.392.923	1 Sub Kegiatan	420.281.803	1 Sub Kegiatan	441.800.231	1 Sub Kegiatan	465.480.724	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700 Orang	1.500 Orang	1.066.848.000	400 Orang	377.820.900	400 Orang	397.392.923	400 Orang	420.281.803	400 Orang	441.800.231	400 Orang	465.480.724	
Program 5 : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Outcome (Hasil) : Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	N/A	100%	3.326.440.000	100%	2.637.200.000	100%	2.773.806.960	100%	2.933.578.241	100%	3.083.777.447	100%	3.249.067.918	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	3 Sub Kegiatan	3.326.440.000	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000	3 Sub Kegiatan	2.773.806.960	3 Sub Kegiatan	2.933.578.241	3 Sub Kegiatan	3.083.777.447	3 Sub Kegiatan	3.249.067.918	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	50 Orang	334.240.000	70 Orang	350.000.000	70 Orang	350.000.000	70 Orang	400.000.000	70 Orang	400.000.000	1.500 Orang	565.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	537.200.000	12 Laporan	534.480.000	12 Laporan	564.480.000	12 Laporan	610.080.000	12 Laporan	750.000.000	12 Laporan	750.000.000	
Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Output (Keluaran) : Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	2.455.000.000	12 Dokumen	1.752.720.000	12 Dokumen	1.859.326.960	12 Dokumen	1.923.498.241	12 Dokumen	1.933.777.447	12 Dokumen	1.934.067.918	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Program 6 : Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Outcome (Hasil) : Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Layanan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	N/A	100%	12.765.800.250	100%	13.213.744.000	100%	13.478.018.880	100%	13.747.579.258	100%	14.022.530.840	100%	14.302.981.460	
Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	N/A	2 Dokumen	136.640.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	76.500.000	2 Dokumen	78.030.000	2 Dokumen	79.590.600	2 Dokumen	81.182.412	
Sub Kegiatan 1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	1 Dokumen	111.640.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	52.020.000	1 Dokumen	53.060.400	1 Dokumen	54.121.608	
Sub Kegiatan 1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output (Keluaran) : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.500.000	1 Laporan	26.010.000	1 Laporan	26.530.200	1 Laporan	27.060.804	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	N/A	2 Laporan	10.596.517.000	2 Laporan	11.468.744.000	2 Laporan	11.498.118.880	2 Laporan	11.732.081.258	2 Laporan	11.970.722.880	2 Laporan	12.214.137.341	
Sub Kegiatan 2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output (Keluaran) : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.026 Orang / Bulan	1.142 Orang / Bulan	10.581.517.000	1.316 Orang / Bulan	11.453.744.000	1.316 Orang / Bulan	11.483.118.880	1.316 Orang / Bulan	11.717.081.258	1.316 Orang / Bulan	11.955.722.880	1.316 Orang / Bulan	12.199.137.341	
Sub Kegiatan 2.2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Output (Keluaran) : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	
Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	2 Laporan	230.000.000	1 Laporan	20.000.000	3 Laporan	220.400.000	3 Laporan	220.808.000	3 Laporan	221.224.160	3 Laporan	221.648.643	
Sub Kegiatan 3.1 : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Output (Keluaran) : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50 Paket	200.000.000	0 Paket	-	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 3.2 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Output (Keluaran) : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	6 Orang	30.000.000	10 Orang	20.000.000	5 Orang	20.400.000	5 Orang	20.808.000	5 Orang	21.224.160	5 Orang	21.648.643	
Sub Kegiatan 3.3 : Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang Output (Keluaran) : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang- Undang	50 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	
Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	6 Laporan	1.038.700.000	6 Laporan	875.000.000	6 Laporan	892.500.000	6 Laporan	910.350.000	6 Laporan	928.557.000	6 Laporan	947.128.140	
Sub Kegiatan 4.1 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output (Keluaran) : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	350.000.000	3 Paket	350.000.000	4 Paket	357.000.000	4 Paket	364.140.000	4 Paket	371.422.800	4 Paket	378.851.256	
Sub Kegiatan 4.2 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output (Keluaran) : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	38.700.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	76.500.000	12 Paket	78.030.000	12 Paket	79.590.600	12 Paket	81.182.412	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 4.3 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output (Keluaran) : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	51.000.000	12 Dokumen	52.020.000	12 Dokumen	53.060.400	12 Dokumen	54.121.608	
Sub Kegiatan 4.4 : Fasilitasi Kunjungan Tamu Output (Keluaran) : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	102.000.000	12 Laporan	104.040.000	12 Laporan	106.120.800	12 Laporan	108.243.216	
Sub Kegiatan 4.5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output (Keluaran) : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	255.000.000	12 Laporan	260.100.000	12 Laporan	265.302.000	12 Laporan	270.608.040	
Sub Kegiatan 4.6 : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Output (Keluaran) : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	51.000.000	12 Dokumen	52.020.000	12 Dokumen	53.060.400	12 Dokumen	54.121.608	
Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	N/A	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	102.000.000	1 Laporan	104.040.000	1 Laporan	106.120.800	1 Laporan	108.243.216	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 5.1 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output (Keluaran) : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	0 Unit	-	7 Unit	100.000.000	7 Unit	102.000.000	7 Unit	104.040.000	7 Unit	106.120.800	7 Unit	108.243.216	
Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	1 Laporan	268.543.250	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Sub Kegiatan 6.1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output (Keluaran) : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	268.543.250	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	N/A	3 Laporan	495.400.000	3 Laporan	675.000.000	3 Laporan	688.500.000	3 Laporan	702.270.000	3 Laporan	716.315.400	3 Laporan	730.641.708	
Sub Kegiatan 7.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output (Keluaran) : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	400.000.000	22 Unit	350.000.000	15 Unit	357.000.000	15 Unit	364.140.000	15 Unit	371.422.800	15 Unit	378.851.256	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Sub Kegiatan 7.2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output (Keluaran) : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	95.400.000	25 Unit	75.000.000	25 Unit	76.500.000	25 Unit	78.030.000	25 Unit	79.590.600	25 Unit	81.182.412	
Sub Kegiatan 7.3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Output (Keluaran) : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	255.000.000	1 Unit	260.100.000	1 Unit	265.302.000	1 Unit	270.608.040	
JUMLAH				38.550.364.050		34.252.144.200		35.606.208.211		37.150.352.294		38.623.525.855		40.222.589.809	

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyelaraskan setiap program dan kegiatannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, uraian sub kegiatan disusun tidak hanya sebagai penjabaran teknis dari program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

Sub kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dini, memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila, serta memperluas ruang partisipasi politik masyarakat secara sehat dan demokratis. Seluruh sub kegiatan tersebut dikaitkan dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Bekasi yang “*Nyaman*” dan “*Sejahtera*”.

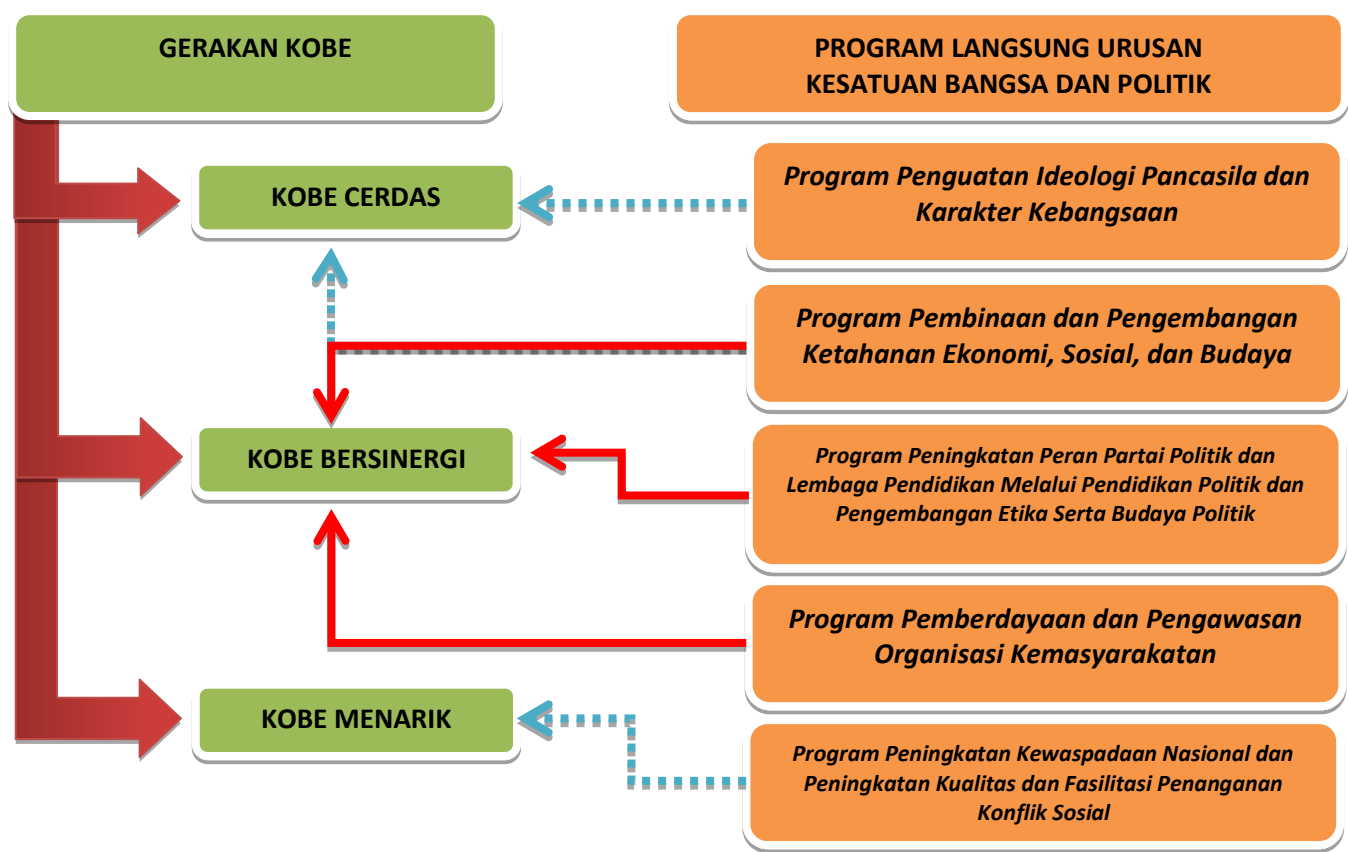
Untuk mencapai Visi tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025, terdapat Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 yaitu “**Sapta Program Kota Bekasi Keren**” yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**);

5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Dari penjelasan Program prioritas tersebut, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yang mendukung terhadap Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2025 – 2029, dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan 4.1
Perjenjangan Program Prioritas RPJMD (Sapta Program Kota Bekasi Keren) dengan Program Langsung Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029



Dari 5 (lima) Program urusan langsung yang menjadi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dijelaskan bahwa dari 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan sesuai RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 (Sapta Kota Bekasi Keren),

terdapat 3 (tiga) Program Prioritas yang memiliki keterkaitan, diantaranya : ***Gerakan KOBE CERDAS***, ***Gerakan KOBE BERSINERGI*** dan ***GERAKAN KOBE MENARIK***.

Berdasarkan korelasi yang ditunjukkan melalui bentuk dan warna arah panah keterkaitan Program langsung urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi terhadap Program Prioritas Daerah, warna merah dengan garis tegas menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Bekasi mendukung secara langsung terhadap Program Prioritas Pembangunan ***“Gerakan KOBE BERSINERGI”*** dan warna biru dengan garis putus – putus menunjukkan bahwa, Badan Kesbangpol Kota Bekasi berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi juga mendukung secara tidak langsung terhadap ***“Gerakan KOBE CERDAS”*** dan ***“Gerakan KOBE MENARIK”***.

Tabel 4.3
Cascading Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Indikator Tujuan : Indeks Harmoni Target 1. Tahun 2025 : 6,47 2. Tahun 2026 : 6,48 3. Tahun 2027 : 6,49 4. Tahun 2028 : 6,51 5. Tahun 2029 : 6,53 6. Tahun 2030 : 6,55	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi Indikator Tujuan : INKLUSI SOSIAL Target 1. Tahun 2025 : 7,63 2. Tahun 2026 : 7,65 3. Tahun 2027 : 7,67 4. Tahun 2028 : 7,69 5. Tahun 2029 : 7,71 6. Tahun 2030 : 7,73	<i>Program 1 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> Indikator Program : Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Target 1. Tahun 2025 : 100 % 2. Tahun 2026 : 100 % 3. Tahun 2027 : 100 % 4. Tahun 2028 : 100 % 5. Tahun 2029 : 100 % 6. Tahun 2030 : 100 %	<i>GERAKAN KOBE CERDAS</i>	<i>Terbangunnya unit pembelajaran, pencegahan dan penanganan Narkoba</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Sub Kegiata 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>
		<i>Program 2 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</i>	<i>Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat</i> Indikator Program : <i>Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan</i> Target 1. Tahun 2025 : 100 % 2. Tahun 2026 : 100 % 3. Tahun 2027 : 100 % 4. Tahun 2028 : 100 % 5. Tahun 2029 : 100 % 6. Tahun 2030 : 100 %	<i>GERAKAN KOBE CERDAS</i>	<i>Terbangunnya unit pembelajaran, pencegahan dan penanganan Narkoba</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Sub Kegiata 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				GERAKAN KOBE BERSINERGI	Terciptanya kebebasan beribadah dan kerukunan kehidupan beragama yang semakin kondusif didukung peningkatan sarana dan prasarana beribadah secara proporsional sesuai kebutuhan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Program 3 (Langsung Urusan) : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik <i>Indikator Program :</i> Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik <i>Target</i> 1. Tahun 2025 : 100 % 2. Tahun 2026 : 100 % 3. Tahun 2027 : 100 % 4. Tahun 2028 : 100 % 5. Tahun 2029 : 100 % 6. Tahun 2030 : 100 %	GERAKAN KOBE BERSINERGI	Berkembangnya kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat bagi organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, keswadayaan masyarakat, profesi, dan berbagai komunitas yang ada	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		<i>Program 4 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan</i> <i>Indikator Program :</i> <i>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif</i> <i>Target</i> <i>1. Tahun 2025 : 70 %</i> <i>2. Tahun 2026 : 71 %</i> <i>3. Tahun 2027 : 72 %</i> <i>4. Tahun 2028 : 73 %</i> <i>5. Tahun 2029 : 74 %</i> <i>6. Tahun 2030 : 75 %</i>	<i>GERAKAN KOBE BERSINERGI</i>	<i>Berkembangnya kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat bagi organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, keswadayaan masyarakat, profesi, dan berbagai komunitas yang ada</i>	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	<i>Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>
							<i>Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>
	Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah Indikator Sasaran : Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan Target <i>1. Tahun 2025 : 100 %</i> <i>2. Tahun 2026 : 100 %</i> <i>3. Tahun 2027 : 100 %</i> <i>4. Tahun 2028 : 100 %</i> <i>5. Tahun 2029 : 100 %</i> <i>6. Tahun 2030 : 100 %</i>	<i>Program 5 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan</i> <i>Indikator Program :</i> <i>Persentase konflik sosial yang diselesaikan</i> <i>Target</i> <i>1. Tahun 2025 : 100 %</i> <i>2. Tahun 2026 : 100 %</i> <i>3. Tahun 2027 : 100 %</i> <i>4. Tahun 2028 : 100 %</i> <i>5. Tahun 2029 : 100 %</i> <i>6. Tahun 2030 : 100 %</i>	<i>GERAKAN KOBE MENARIK</i>	<i>Terciptanya iklim yang kondusif dengan kemudahan akses informasi, insentif penguat daya tarik investasi, dan kemudahan proses perijinan</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							<i>Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>
							<i>Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>

Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set tanggal 11 Agustus 2025.

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diwujudkan melalui capaian kinerja yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 , dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Inklusi Sosial	Nilai	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73	
2	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	

Melalui IKU tersebut, pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan dapat dipantau secara periodik, dievaluasi secara objektif, serta dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya merefleksikan kinerja teknis Badan Kesbangpol, tetapi juga menjadi tolok ukur strategis dalam mendukung terwujudnya Program Prioritas Kepala Daerah terpilih Tahun 2025 – 2029.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang selaras dengan RPJMD serta mendukung dan menegaskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja yang menjadi landasan dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan Renstra ini berlandaskan pada prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta menjunjung sinergi antar pemangku kepentingan. Setiap program dan kegiatan yang dijalankan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat kohesi sosial, kerukunan umat beragama, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik di Kota Bekasi.

Dengan tersusunnya Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh jajaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Kota Bekasi yang **“Nyaman Kotanya, Sejahtera Masyarakatnya”**.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi



Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141

Pos el : kesbangpolkotabekasi123@gmail.com, Laman :

<https://kesbangpol.bekasikota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

NOMOR : 700.1.1.3/ /632 /BADAN KESBANGPOL.Set

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.15-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 0505-05889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025-2029 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Ser E);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang {erencanaan Pambangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 09 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 11.A Seri E);

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 129 Tahun 2021 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
 2. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;
 3. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029;
 4. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029; dan
 5. menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 05 AGUSTUS 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bekasi,



Nesan Sujana S.T., M.T. CGCAE

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

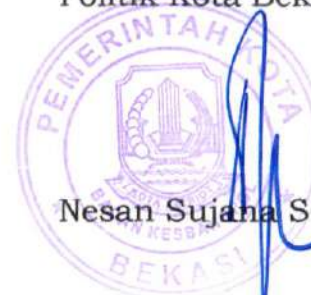
NOMOR : 700.1.1.3/ 1632 /BADAN KESBANGPOL.Set

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	NAMA / JABATAN	URAIAN TUGAS
I	Pengarah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Memberikan arahan dan instruksi serta bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
II	Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Mengkoordinasikan pelaksanaann penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
III	Sekretaris	Perencana Ahli Muda	Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
IV	Koordinator Bidang	1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri; 3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; 4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terkait lingkup Bidangnya masing – masing.
V	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2023 dan 2024; 2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumenlainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029;

NO.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	NAMA / JABATAN	URAIAN TUGAS
			4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dan 5. Menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
VI	Sekretariat	1. Hardiyanti Ika Purnami, S.Kom.; 2. Haris Panji Rusmana, S.AP,M.M.; 3. Vandyarman Mulya Priyanda, S.Sos., M.A.; 4. Nurtafah Diawati; 5. Ali Azeharie; 6. Catur Edi Hardiyanto; 7. Rachmat Sulistiyo.	Menyusun dan menghimpun administrasi seperti surat, notulensi, berita acara dan / atau laporan pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bekasi,



Nesan Sujana S.T., M.T. CGCAE

AGENDA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025 - 2029

NO	URAIAN AKSI	OUTPUT	Tahun 2025						
			Bulan Agustus				Bulan September		
			Minggu ke - 1	Minggu ke - 2	Minggu ke - 3	Minggu ke - 4	Minggu ke - 1	Minggu ke - 2	Minggu ke - 3
1	Menetapkan Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029	1 SK Tim dan Agenda Tim Kerja Penyusun Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029							
		2 Dokumen Evaluasi : Data Rumusan Identifikasi Isu Strategis PD, Data pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis PD, Data pemetaan Strategi dan Arah Kebijakan PD, Dokumen Cascade Kinerja Rencana Strategis PD, Data Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan beserta proyeksi pendanaan pagu indikatif PD.							
		3 Surat Undangan lingkup internal terkait Pembahasan Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029							
2	Rapat Pembahasan Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029	Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 yang terlampir dengan Dokumen Evaluasi yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.							
3	Penyusunan Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029	Draft Dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029							
4	Konsultasi / Koordinasi dengan pihak pengampu Perangkat Daerah (Bappelithangda /Itko Kota Bekasi)	Lembar Verifikasi dari pengampu PD yang telah ditandatangani terkait Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029							
5	Pengesahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Apabila telah disetujui oleh Tim Verifikator dan Kepala Perangkat Daerah)	Berita Acara terkait Penetapan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029							

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Nesun Suyana, S.T., M.T., CGCAE
NIP. 19740708 2 0212 1 007



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
Pos el : kesbangpolkotabekasi123@gmail.com, Laman: <https://kesbangpol.bekasikota.go.id>

BERITA ACARA

RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025 – 2029

Nomor : 000.7.6.1 / 1676 / BADAN KESBANGPOL.Set

Pada hari *Senin, tanggal 11 Agustus 2025*, bertempat di *Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi*, telah dilaksanakan *Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029*.

Rapat dipimpin oleh *Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi* serta dihadiri oleh pejabat struktural, fungsional, dan staf terkait sesuai daftar hadir yang terlampir.

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :

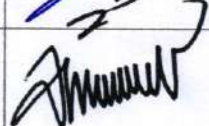
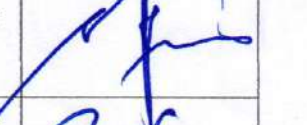
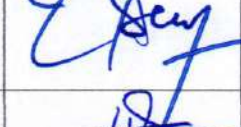
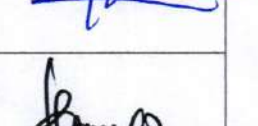
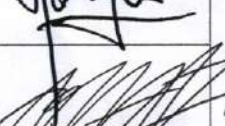
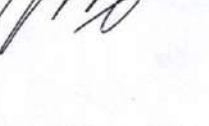
1. Penyampaian arahan umum terkait penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029;
2. Pembahasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Identifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025 - 2029;
4. Diskusi dan inventarisasi masukan dari peserta rapat untuk penyempurnaan dokumen Renstra;
5. Penegasan tindak lanjut dan penjadwalan penyusunan draft akhir Renstra.

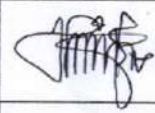
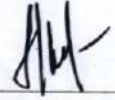
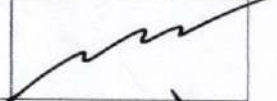
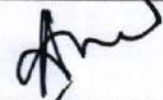
Hasil rapat menyepakati hal - hal sebagai berikut:

- Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rancangan Rencana Strategis, Cascading Kinerja Rencana Strategis, Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan beserta proyeksi pendanaan pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum pada lampiran II - VI berita acara ini;

- Berita Acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2025 – 2029.

Menyetujui,

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda tangan
1	Yunan Albaehaqi, S.Sos, M.M. NIP. 19710608 199003 1 001	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	
2	Agus Enap, M.Pd NIP. 19690420 199603 1 005	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	
3	Ratna Ningsih, S.AP., M.Si. NIP. 19680609 200701 2 011	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
4	Muhamad Arifin, S.IP. NIP. 19680210 199403 1 008	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	
5	Muhammad Zainuddin, S.H. NIP. 19750106 200901 1 001	Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
6	Yani Amiasari, S.H., M.Si. NIP. 19690403 199903 2 002	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
7	Nazarudin Latif, S.E. NIP. 19730823 200604 1 008	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	
8	Etty Kurnaeny, S.E., M.Si. NIP. 19731118 2009012 001	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	
9	Usep, S.Sos., M.M. NIP. 19690716 199103 1 002	Kepala Sub Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	
10	Chrisman Hamonangan Tambunan, S.E. NIP. 19710125 199903 1 005	Kepala Sub Bidang Bela Negara Dan Karakter Bangsa	
11	Tomy Ari Wibowo, S.E. NIP. 19761212 201001 1 001	Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik Dan Peningkatan Demokrasi	
12	Muhammad Arafat Imam Ghozali, S.STP., M.AP. NIP. 19910620 201206 1 001	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	

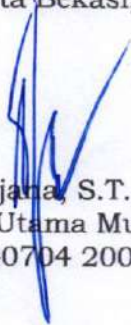
No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda tangan
13	Ervin Wedianti, S.E., M.M. NIP. 19720225 199903 2 004	Perencana Ahli Muda	
14	Yunita Tuwardhini, S.E., M.A. NIP. 19700617 199803 2 008	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	
15	Hardiyanti Ika Purnami, S.Kom. NIP. 19780924 199803 2 002	Arsiparis Ahli Muda	
16	Neni Lusiani, S.H., M.Si. NIP. 19781128 200112 2 001	Penata Layanan Operasional	
17	Haris Panji Rusmana, S.AP., M.M. NIP. 19781025 200604 1 009	Pengelola Layanan Operasional	
18	Evie Nuriyani, S.E. NIP. 19820115 200902 2 001	Pengelola Layanan Operasional	
19	Titi Maryati, S.E. NIP. 19681209 200701 2 006	Penata Layanan Operasional	
20	Nurmayanti, S.E. NIP. 19760501 200901 2 001	Penata Layanan Operasional	
21	Dwi Murdiantoro, S.E. NIP. 19800415 200812 1 001	Penata Layanan Operasional	
22	Imawan Susila NIP. 19770704 201312 1 001	Pengelola Layanan Operasional	
23	Ali Azeharie NIP. 19800703 201412 1 002	Pengelola Layanan Operasional	
24	Saifulloh NIP. 19820714 200901 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	
25	Catur Edi Hardiyanto NIP. 19940614 202521 1 031	Pengadministrasi Perkantoran	
26	Rachmat Sulistiyo NIP. 19891117 202521 1 040	Penata Layanan Operasional	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Agustus 2025

Pimpinan Rapat,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi,


Nesan Sujana, S.T., M.T. CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19740704 200212 1 007

Lampiran I
Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
Tahun 2025 – 2029
Nomor :000.7.6.1/1676/BADAN KESBANGPOL.SET
Tanggal: 11 Agustus 2025

**DOKUMENTASI / BUKTI DUKUNG
PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

“Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029”



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141

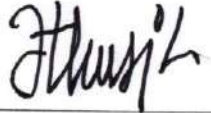
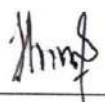
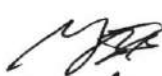
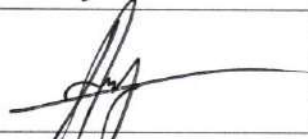
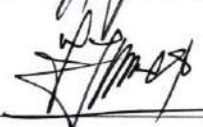
Pos el : kesbangpolkotabekasi123@gmail.com, Laman :

<https://kesbangpol.bekasikota.go.id>

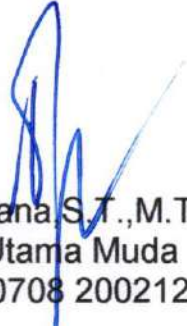
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : **SENIN** , // Agustus 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
Perihal : Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, periode : 2025 - 2029

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	NESMA SUGMA	KABAN	
2	Ratna.	Kepala Bidang	
3	Muhb. Jams	Plt Kabid	
4	AGUS ENAB	Kabid	
5	Lsep.	Sebid. Humas	
6	Tommy Ari .W.	Kasubid	
7	Ervin	Jatung Perencana	
8	Christina .H.T.	Kasubid Humas	
9	titik . m .	ANALIS keagamaan	
10	Dicky kurniadi	Kasubid kewaspadaan	
11	Nurhijrah	Pelaksana	
12	Nurmaganti	Analisis FROM	
13	Ibnu toba	Pelaksana	

NO	NAMA	JABATAN	TTD
14	Neni Wani	Penata Layanan Operasional	
15	Evel. Purijanti	Pelaksana	
16	Ray Ade Lestari	,	
17	R. SULISTIYO	PEWATA LAYANAN OPERASIONAL	
18	Andhini H	Pengadministrasi Perkantoran	
19	Senira Izati F	Pengelola Layanan Operasional	
20	Catur Edi Hardiyanto	Pengadministrasi Perkantoran	
21	HARIS	PELAKSANA	
22	Tumbras	— " —	
23	Taufan	"	
24	SaifulloH	Staf poldagri	
25	Wawan. S	Pengadministrasi Perkantoran	

Mengetahui, // Agustus 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi


Nesan Sujana S.T., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19740708 200212 1 007

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI**



Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2025 – 2029. Aula Rapat Badan Kesbangpol, 11 Agustus 2025.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141

Pos el : kesbangpolkotabekasi123@gmail.com, Laman :

<https://kesbangpol.bekasikota.go.id>

Bekasi, 08 Agustus 2025

Nomor : 000.7.6.1 / 1663 /BADAN KESBANGPOL.Set
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Penyusunan
Rencana Strategis Bakesbangpol
Kota Bekasi 2025-2029

Kepada
Yth. Para Kabid, Kasubid, Kasubag
dan Jabatan Fungsional
di Lingkungan Bakesbangpol
di -
B E K A S I

Menindaklanjuti surat edaran dari Wali Kota Bekasi nomor : 000.7.2.2 / 3486 / Bappelitbangda.AP4EP tanggal 31 Juli 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, dan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi nomor : 700.1.1.3/ 1632 /BADAN KESBANGPOL.Set tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, sehubungan hal tersebut, para Kabid, Kasubid, Kasubag dan Jabatan Fungsional diharapkan hadir, pada :

Hari / Tanggal : Senin / 11 Agustus 2025
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Lokasi : Ruang Rapat Kepala Badan Kesbangpol
Kota Bekasi

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, diharapkan para Kabid, Kasubid, Kasubag dan Jabatan Fungsional dapat hadir tepat waktu. Demikian agar maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi,



Nesan Sujana, S.T., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740708 200212 1 007

Pemetaan Permasalahan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Masalah Pokok	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan	Akar Masalah
Potensi konflik sosial akibat dinamika politik, keberagaman budaya, agama, maupun kepentingan ekonomi	1. Heterogenitas masyarakat Kota Bekasi; 2. Dinamika politik lokal dan nasional; 3. Persaingan kepentingan ekonomi, dan 4. Lemahnya komunikasi lintas elemen masyarakat	Belum optimalnya mekanisme dialog dan koordinasi antar elemen masyarakat serta lemahnya sistem mediasi konflik sejak dini
Rendahnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di masyarakat	1. Minimnya pendidikan politik dan kebangsaan; 2. Kurangnya materi penguatan ideologi di lingkungan pendidikan dan masyarakat, dan 3. Pengaruh media sosial yang tidak terfilter.	Belum maksimalnya program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat
Terbatasnya sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial di tingkat daerah	1. Minimnya sarana prasarana pendukung; 2. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan 3. Rendahnya kapasitas SDM dalam melakukan analisis potensi konflik.	Belum terbangunnya sistem deteksi dini yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah
Lemahnya kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik	1. Rendahnya ketaatan administrasi organisasi; 2. Minimnya transparansi dan akuntabilitas, dan 3. Belum optimalnya peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan daerah.	Belum efektifnya mekanisme pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap Ormas dan Parpol
Partisipasi politik masyarakat belum berkualitas dan berintegritas	1. Rendahnya literasi politik masyarakat; 2. Pengaruh politik uang dan pragmatisme; 3. Kurangnya sosialisasi politik yang mendidik.	Masih rendahnya kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang sehat dan berintegritas
Keterbatasan SDM dan anggaran pada Badan Kesbangpol	1. Jumlah dan kompetensi SDM belum mencukupi, dan 2. Alokasi anggaran relatif kecil dibanding beban tugas.	Keterbatasan dukungan anggaran daerah serta belum optimalnya pengembangan kapasitas aparatur Kesbangpol

Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

TANTANGAN	
Internal	Eksternal
1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur; 2. Paradigma subjektif terhadap peranan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah; 3. Belum jelasnya kedudukan lembaga Badan Kesbangpol jika merujuk kepada urusan-urusan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 4. Belum tersusunnya fungsional keahlian tertentu di bidang kesatuan bangsa dan politik.	1. Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; 2. Adanya perbedaan budaya yang mengakibatkan ketidakpahaman dan komunikasi antar buday yang memicu konflik sosial; 3. Demokrasi yang berjalan masih procedural; 4. Pemahaman dan ideologi radikal yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.; 5. Potensi <i>hate crime</i> yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
PELUANG	
Internal	Eksternal
- Tersedianya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi; - Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi. - Tersedianya fasilitas bagi sumber daya manusia organisasi untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi;	1. Tersedianya Peraturan yang mengatur tentang peranan, tugas dan fungsi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik (UU.23/2014, Permendagri No. 11 / 2019, Permendagri No.90/2019 dan substansi yang lainnya); 2. Tersedianya Forum Masyarakat yang mendukung peranan tugas dan fungsi Badan Kesataun Bangsa dan Politik di Kota Bekasi, diantaranya : - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 3. Tersedianya lembaga bentukan Pemerintah yang menunjang peranan tugas dan fungsi Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diantaranya : - Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). 4. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, indikator diantaranya : - Adanya Organisasi Kemasyarakatan; - Adanya masyarakat sebagai anggota dan pengurus partai politik; - Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Kota Bekasi (Data BAWASLU).

Rumusan Identifikasi Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Cipta kondisi stabilitas dan ketertiban daerah	Permasalahan Ekternal : - Dinamika Sosial Politik di Daerah : <i>Potensi konflik sosial akibat dinamika politik, keberagaman budaya, agama maupun kepentingan ekonomi;</i> - Ideologi dan Ketahanan Bangsa : <i>Ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Pengaruh Ideologi Transnasional;</i> - Organisasi Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat : <i>Masih banyak ditemukannya Ormas/LSM/Komunitas dengan orientasi beragam yang tidak sejalan dengan visi pembangunan daerah (Premanisme, Tindakan anarkis dan tidak tertib administrasi)</i>	Heterogenitas Agama, Etnis dan Budaya : - Tingginya potensi Intoleransi dan Konflik SARA; - Menurunnya Kohesi Sosial. Ancaman Radikalisme dan Intoleransi : - Infiltrasi radikal dan intoleran ke masyarakat; - Gangguan Stabilitas Daerah. Dinamika Politik : <i>Potensi Polarisasi Politik dan Konflik Antar Kelompok</i> Aktivitas Ormas yang semakin beragam : - Risiko penyalahgunaan kebebasan berserikat; - Potensi aksi anarkis dan Pelanggaran Hukum	Perubahan Geopolitik Internasional : <i>Infiltrasi ideologi luar yang tidak sesuai dengan Pancasila;</i> Dinamika Ekonomi Global : <i>Gangguan Stabilitas Politik</i> Arus Globalisasi dan Digitalisasi : Risiko Penyebaran Hoaks, Radikalisme Online dan Propaganda Politik lintas Negara Ancaman Keamanan Non-Tradisional : <i>Terorisme, Siber Crime, Narkotika dan Trafficking (Perdagangan Ilegal)</i>	Implementasi RPJPN 2025 – 2045 dan RPJMN 2025 – 2029 : <i>Penguatan Demokrasi, Ketahanan Ideologi dan Stabilitas Politik Dalam Negeri</i> Meningkatnya potensi konflik horizontal : <i>Isu SARA, Intoleransi, serta polarisasi Politik di masyarakat pasca Pemilu</i>	Perumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat : <i>Potensi gesekan sosial dan konflik kepentingan akibat heterogenitas yang tinggi;</i> Tingginya arus urbanisasi dan Migrasi : <i>Potensi disintegrasi sosial keragaman budaya;</i> Tantangan Ketahanan ideologi di kalangan generasi muda : <i>Potensi arus budaya populer global yang dapat melemahkan nilai – nilai kebangsaan</i> Meningkatnya aktivitas organisasi masyarakat dan kelompok kepentingan : <i>Potensi kerawanan Politik</i>	- Ketahanan Daerah terhadap Ancaman Radikalisme dan Disintegrasi; - Penguatan Wawasan Kebangsaan; - Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial; - Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Politik (Parpol); - Peningkatan Partisipasi Politik; - Optimalisasi Kapasitas Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Permasalahan Internal : 1. Kapasitas Kelembagaan dan SDM : <i>Paradigma subjektif terhadap peranan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah; Keterbatasan jumlah dan kompetensi Aparatur;</i> 2. Sarana dan Prasarana : <i>Fasilitas pendukung pengelolaan data terbatas</i> 3. Perencanaan dan Penganggaran : <i>Keterbatasan alokasi anggaran</i>					

Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029
Nomor :000.7.6.1/1676/BADAN KESBANGPOL.SET
Tanggal : 11 Agustus 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

1. Tujuan

Tujuan, Indikator Tujuan dan Target dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 : "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat". Indikator Sasaran : "Indeks Harmoni" Target : 1. Tahun 2025 : 6,47 2. Tahun 2026 : 6,48 3. Tahun 2027 : 6,49 4. Tahun 2028 : 6,51 5. Tahun 2029 : 6,53 6. Tahun 2030 : 6,55	<i>"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat".</i>		<i>"Indeks Harmoni"</i>	6,47	6,48	6,49	6,51	6,53	6,55	
		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73	
		Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Catatan :

1. Tujuan Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2029 adalah *"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat"* yang selaras dengan Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang dengan indikator *"Indeks Harmoni"*. Adapun dalam pengukuran kinerja Indeks Harmoni ini mengacu terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor : 400.4.7/e-170/Polpum tanggal 25 Februari 2025 tentang Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Tahun 2025, yang dalam pengukurannya diukur dari 4 (empat) dimensi, yaitu : Dimensi Ekonomi (Skor 30%), Dimensi Sosial (Skor 23%), Dimensi Budaya (Skor 22%) dan Dimensi Religius / Keberagaman (Skor 25%), dengan 8 (delapan) variabel dan 40 (empat puluh) indikator, yang pelaksanaan pengukurannya melalui e-Survey Riset Publik (Surat Terlampir).

2. Sasaran Strategis ke – 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2029 adalah “*Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi*” dengan Indikator “*Inklusi Sosial*”. Adapun maksud dan tujuan, menetapkan sasaran rencana strategis ini dengan menggunakan Indikator “*Inklusi Sosial*” adalah untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkup peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Dalam perhitungan perolehan capaian kinerja, adapun dimensi pengukuran dinilai dari substansi aspek , diantaranya :

- a. Skor Akses : *Akses dan Kesetaraan Layanan Publik*, dimensi ini diukur dari tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memfasilitasi terkait dengan pelayanan terhadap kelompok rentan (difabel, lansia, perempuan, dan kelompok minoritas) yang merasa terlayani secara setara. Adapun sumber data diperoleh dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi melalui Aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi (<https://sisukma.bekasikota.go.id/>).
- b. Skor Partisipasi : *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi*, dimensi ini diukur dari jumlah / proporsi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Politik dan Pemilu yang tercatat / dilaporkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
- c. Skor Toleransi : *Toleransi dan kehidupan Harmonis Antarwarga*, dimensi ini diperoleh dari Nilai Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Bekasi.

Dari sebagaimana penjelasan dimensi pengukuran Indeks Inklusi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dimensi diukur melalui kombinasi data kuantitatif (Data Partisipasi) dan Data Kualitatif (Hasil Survei Presepsi). Setiap dimimensi dinormalisasi dalam Skala 1 – 10, lalu dirata – ratakan untuk mendapatkan Nilai Indeks Inklusi Sosial Tahunan. Adapun formulasi :

1. Dimensi Skor Akses :

Berdasarkan hasil perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada tahun 2024 memperoleh nilai, sebagai berikut :

- Perolehan SKM Semester I 2024 : 85,22
- Perolehan SKM Triwulan III 2024 : 81,62
- Perolehan SKM Triwulan IV 2024 : 83

$$\text{IKM Kesbangpol 2024} = \frac{85,22+81,62+83}{3} = 82,28$$

Normalisasi Skala 1-10, sehingga untuk perolehan Dimensi Skor Akses adalah 8,2.

2. Dimensi Skor Partisipasi

Berdasarkan hasil perolehan kinerja yang menjadi urusan langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada tahun 2024 memperoleh nilai Dimensi Skor Partisipasi, sebagai berikut :

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Persentase (%)
1	Program 1 : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.620	510	31,48
2	Program 2 : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400	2.168	90,33
3	Program 3 : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300	325	108,33

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Persentase (%)
4	Program 4 : Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700	2.450	144,11
5	Program 5 : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400	280	70

Sumber data : Dokumen Evaluasi Renja Badan Kesbangpol TW. IV Tahun 2024, diolah.

Dari data tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terkait dengan perolehan data *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi* yang tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, maka perhitungan perolehan Skor Partisipasi adalah sebagai berikut :

Partisipasi aktif masyarakat dalam Demokrasi dan Berorganisasi yang tercatat

$$= \frac{31,48 + 90,33 + 108,33 + 144,11+70}{5} = 88,85$$

Normalisasi Skala 1-10, sehingga untuk perolehan Dimensi Skor Partisipasi adalah 8,8.

3. Dimensi Skor Toleransi

Berdasarkan perolehan penilaian dari *SETARA Institute for Democracy and Peace* tahun 2024, Kota Bekasi menempati urutan ke – 7 sebagai Kota Toleran di Indonesia, dengan perolehan Skor Akhir sebesar **5,939**

Normalisasi Skala 1-10, sehingga untuk perolehan Dimensi Skor Toleransi adalah 5,9.

Dari formulasi Dimensi Skor Akses, Dimensi Skor Partisipasi dan Dimensi Skor Toleransi yang telah diuraikan diatas dalam mendukung “Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi” dengan Indikator “Inklusi Sosial”, maka penetapan target capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Rumusan Indeks Inklusi Sosial (IIS) :

$$IIS = \frac{Skor\ Akses + Skor\ Partisipasi + Skor\ Toleransi}{3}$$
$$= \frac{8,2 + 8,8 + 5,9}{3} = 7,63 \text{ (Baseline Data Tahun 2025)}$$

Setelah diketahuinya baseline data pada tahun 2025 tersebut, maka penentuan target Indeks Inklusi Sosial untuk tahun 2026 – 2030 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Target (Indeks)	Dimensi Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1	2025	7,63	1. Akses dan Kesenjangan Layanan Publik; 2. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi; 3. Toleransi dan kehidupan Harmonis Antarwarga	• Survei persepsi masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); • Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi yang tercatat pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi; • Data Indeks Kota Toleran (IKT)	Perhitungan awal Indeks, baseline ditetapkan tahun 2025
2	2026	7,65			
3	2027	7,67			
4	2028	7,69			
5	2029	7,71			
6	2030	7,73			

3. Sasaran Strategis ke - 2 adalah “Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah” dengan indikator “Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan”. Berdasarkan pengukuran kinerja indikator ini memfokuskan terhadap bagaimana peranan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memfasilitasi penanganan terhadap konflik yang diterima atau yang dilaporkan,sehingga dalam formulasi rumusan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan

Formulasi := $\frac{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ Daerah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ Daerah\ yang\ dilaporkan} \times 100 \%$

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

1. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

Tahap I Tahun 2026	Tahap II Tahun 2027	Tahap III Tahun 2028	Tahap IV Tahun 2029	Tahap V Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8); - Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); - Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial; -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan - Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8); - Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); - Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial; -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan - Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8).; - Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); - Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (difokuskan kepada pra Pemilu); -Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (difokuskan kepada pra Pemilu); -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional/ PN 8).; - Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); - Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (difokuskan kepada saat dan Pasca Pemilu); -Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (difokuskan kepada saat dan Pasca Pemilu); -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (mendukung Proyek Nasional / PN 8).; - Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Mendukung ketercapaian sasaran dari Misi 4 RPJMD); - Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (difokuskan kepada pra Pemilu); -Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (difokuskan kepada pra Pemilu); -Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

2. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029				
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PEMERINTAH KOTA BEKASI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Norma : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah (Beserta Pemutakhirannya); Inmendagri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Standar : - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); - Indeks Harmoni Indonesia (IHI). Prosedur : - SOP pelaksanaan teknis Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; - SOP pelaksanaan teknis Bidang Politik Dalam Negeri; - SOP pelaksanaan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; - SOP pelaksanaan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Kriteria : - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; - Meningkatnya etika dan budaya politik; - Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan; - Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; - Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan.	Peningkatan Kondusivitas kota untuk mendukung Iklim Investasi	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kota Bekasi, dalam bentuk pelaksanaan : <i>Fasilitasi Pendidikan Bela Negara, Fasilitasi Pendidikan Konsepsi Wawasan Kebangsaan, Fasilitasi pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kota Bekasi.;</i> 2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik di Kota Bekasi, dalam bentuk pelaksanaan : <i>Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat, Fasilitasi bantuan dana hibah bagi lembaga pemerintah (KPU dan BAWASLU), Fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Izin Penelitian (SKIP), Fasilitasi bantuan keuangan bagi anggota Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik di Kota Bekasi.;</i> 3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dalam bentuk pelaksanaan : <i>Fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan, Fasilitasi bantuan keuangan bagi Ormas bentukan Pemerintah dan Ormas Independen masyarakat, Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Ormas, dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.;</i>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PEMERINTAH KOTA BEKASI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam bentuk pelaksanaan : <i>Fasilitasi Sinergitas Tokoh Masyarakat Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah, Fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Fasilitasi Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi;</i> 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dalam bentuk pelaksanaan : <i>Fasilitasi FORKOPIMDA Kota Bekasi, Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi (FKDM, TNI, POLRI, KEJAKSAAN, BINDA, IMIGRASI, dll), Fasilitasi penerbitan Surat Tanda Lapor (STL) Orang Asing dan dan Fasilitasi substansi aspek lainnya yang berkenaan dengan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Kota Bekasi.</i>	



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat Telp (021) 3521535
Website : www.polpum.kemendagri.go.id; email : kesbangpol_depdagri@yahoo.co.id

25 Februari 2025

Nomor : 400.4.7/e-170/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Pengukuran Indeks Harmoni
Indonesia (IHaI) Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 yang telah diintegrasikan dalam Asta Cita sesuai perkembangan kebijakan, dinamika sosial, dan prioritas nasional di bawah kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024 - 2029);
2. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) bertujuan untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk harmoni Indonesia, menganalisa indikator yang mengalami pelemahan dan penurunan sebagai bahan evaluasi dan instrumen untuk penguatan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berbasis *Evidence Based Data* (EBD), dan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029;
3. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) diukur dari 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - a. Dimensi Ekonomi (skor 30%);
 - b. Dimensi Sosial (skor 23%);
 - c. Dimensi Budaya (skor 22%); dan
 - d. Dimensi Religius/Keberagamaan (skor 25%), dengan 8 (delapan) variabel dan 40 (empat puluh) indikator;
4. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 atas dimensi, variabel dan indikator dilakukan dengan menggunakan *e-Survey Riset Public* melalui pengumpulan data dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Kabupaten/Kota di 24 (dua puluh empat) Provinsi, yang akan dimulai dari tanggal 3 Maret sampai dengan 24 Maret 2025 (*Link e-Survey* Kabupaten/Kota menggunakan *link* pada masing-masing Provinsi sebagaimana terlampir);
5. Pengisian *e-Survey* Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dengan target responden, sebagai berikut:
 - 1) Berusaha Sendiri/Wirausahawan.
 - 2) Petani/Nelayan/Peternak/Pekebun/Pekerja Ladang yang dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 3) Petani/Nelayan/Peternak/Pekebun/Pekerja Ladang yang dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar.
- 4) Buruh/Karyawan/Pegawai Swasta.
- 5) Pekerja Bebas.
- 6) Pekerja Keluarga/Tak Dibayar/Ibu Rumah Tangga (IRT).
- 7) Aparatur Sipil Negara (ASN) – PNS & PPPK.
- 8) Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemda.
- 9) Anggota TNI/Polri.
- 10) Dosen/Akademisi/Tenaga Pendidik di Perguruan Tinggi.
- 11) Guru/Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah.
- 12) Dokter/Tenaga Kesehatan (Perawat/Bidan/Apoteker/dll yang setara).
- 13) Anggota DPRD Provinsi.
- 14) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 15) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- 16) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- 17) Mahasiswa/Pelajar.
- 18) Tidak Bekerja.
- 19) Profesi Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna sukses terselenggaranya *Survey* dimaksud mohon perkenan bantuannya untuk menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sebagai *enumerator* (pengumpul data kabupaten/kota) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota sebagai koordinator/kolabolator data *e-Survey* Indeks Harmoni Indonesia (IHal), beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Wilayah (Kanwil) terkait dalam membantu penyebaran *e-Survey*, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); dan
9. Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama.

Koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, melalui *Contact Person/PIC* sebagai berikut:

NO	NAMA	WILAYAH PROVINSI	HP
1.	Indah Puspita Ningsih, S.IP., MM	Banten Daerah Istimewa Yogyakarta	087878007678
2.	Ridwan Alamsyah	Jawa Barat	087797070197
3.	Andi Ilham Nurhadi, S. STP	Sulawesi Selatan	085255984198
4.	Sri Nur Wahyuni, S.IP	Jawa Timur	082292318872
5.	Aurora Tanjayani M, S.Tr.Ip	Jawa Tengah	089516176361
6.	Melisa Nur Fajria	Sumatera Barat	08119450594
7.	Aurina Anindya Nawang S, S.Psi	Nusa Tenggara Timur	085156127818
8.	Muh. Fiqhi Fauzan Ibrahim, S.In	Sumatera Selatan Kepulauan Riau	08568848393
9.	A. Muhammad Fitra, S.Tr.Ip	Sulawesi Tengah Bali	082129635076

10.	Desi Ester Masombe, S.S., M.Par	Maluku Maluku Utara	085243331316
11.	Ani Lorenza, S.Tr.Ip	Nusa Tenggara Barat DKI Jakarta	081314367860
12.	Fauzy Maulana Malik, S.Tr.Ip	Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah	085720953955
13.	Teuku Muhammad Syauqan, S.STP	Kalimantan Utara Kalimantan Timur	081223405406
14.	Muhammad Zulfi Musaffa, S.In	Lampung Riau	085717824024
15.	Rakhmad Ryan Ramadhan	Sulawesi Tenggara	081293569327
16.	Timoteus Olong, S. STP	Papua Barat Daya	081221457626
	Gatot Wisiantoro		081288216866

Demikian disampaikan dan atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,



Dr. Drs. Bahtiar, M. Si

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Gubernur Riau;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
4. Gubernur Lampung;
5. Gubernur Kepulauan Riau;
6. Gubernur DKI Jakarta;
7. Gubernur Jawa Barat ;
8. Gubernur Jawa Tengah;
9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Gubernur Jawa Timur;
11. Gubernur Banten;
12. Gubernur Bali;
13. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
14. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
15. Gubernur Kalimantan Tengah;
16. Gubernur Kalimantan Selatan;
17. Gubernur Kalimantan Timur;
18. Gubernur Kalimantan Utara;
19. Gubernur Sulawesi Tengah;
20. Gubernur Sulawesi Selatan;
21. Gubernur Sulawesi Tenggara;
22. Gubernur Maluku;
23. Gubernur Maluku Utara;
24. Gubernur Papua Barat Daya;
25. Bupati Pesisir Selatan;
26. Bupati Solok;
27. Bupati Solok Kabupaten Sijunjung;
28. Bupati Tanah Datar;
29. Bupati Padang Pariaman;
30. Bupati Agam;
31. Bupati Lima Puluh Kota;
32. Bupati Pasaman;
33. Bupati Kepulauan Mentawai;
34. Bupati Dharmasraya;
35. Bupati Solok Selatan;
36. Bupati Pasaman Barat;
37. Bupati Kampar;
38. Bupati Indragiri Hulu;
39. Bupati Bengkalis;
40. Bupati Indragiri Hilir;
41. Bupati Pelawan;
42. Bupati Rokan Hulu;

43. Bupati Rokan Hilir;
44. Bupati Siak;
45. Bupati Kuantan Singingi;
46. Bupati Kepulauan Meranti;
47. Bupati Ogan Komering Ulu;
48. Bupati Ogan Komering Ilir;
49. Bupati Muara Enim;
50. Bupati Lahat;
51. Bupati Musi Rawas;
52. Bupati Musi Banyuasin;
53. Bupati Banyuasin;
54. Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
55. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
56. Bupati Ogan Ilir;
57. Pj. Bupati Empat Lawang;
58. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
59. Bupati Musi Rawas Utara;
60. Bupati Lampung Selatan;
61. Bupati Lampung Tengah;
62. Bupati Lampung Utara;
63. Bupati Lampung Barat;
64. Bupati Tulang Bawang;
65. Bupati Tanggamus;
66. Bupati Lampung Timur;
67. Bupati Way Kanan;
68. Bupati Pesawaran;
69. Bupati Pringsewu;
70. Bupati Mesuji;
71. Bupati Tulang Bawang Barat;
72. Bupati Pesisir Barat;
73. Bupati Bintan;
74. Bupati Karimun;
75. Bupati Natuna;
76. Bupati Lingga;
77. Bupati Kepulauan Anambas;
78. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu;
79. Bupati Bogor;
80. Bupati Sukabumi;
81. Bupati Cianjur;
82. Bupati Bandung;
83. Bupati Garut;
84. Bupati Tasikmalaya;
85. Bupati Ciamis;
86. Bupati Kuningan;
87. Bupati Cirebon;
88. Bupati Majalengka;
89. Bupati Sumedang;
90. Bupati Indramayu;
91. Bupati Subang;

92. Bupati Purwakarta;
93. Bupati Karawang;
94. Bupati Bekasi;
95. Bupati Bandung Barat;
96. Bupati Pangandaran;
97. Bupati Cilacap;
98. Bupati Banyumas;
99. Bupati Purbalingga;
100. Bupati Banjarnegara;
101. Bupati Kebumen;
102. Bupati Purworejo;
103. Bupati Wonosobo;
104. Bupati Magelang;
105. Bupati Boyolali;
106. Bupati Klaten;
107. Bupati Sukoharjo;
108. Bupati Wonogiri;
109. Bupati Karanganyar;
110. Bupati Sragen;
111. Bupati Grobogan;
112. Bupati Blora;
113. Bupati Rembang;
114. Bupati Pati;
115. Bupati Kudus;
116. Bupati Jepara;
117. Bupati Demak;
118. Bupati Semarang;
119. Bupati Temanggung;
120. Bupati Kendal;
121. Bupati Batang;
122. Bupati Pekalongan;
123. Bupati Pemalang;
124. Bupati Tegal;
125. Bupati Brebes;
126. Bupati Kulon Progo;
127. Bupati Bantul;
128. Bupati Gunungkidul;
129. Bupati Sleman;
130. Bupati Pacitan;
131. Bupati Ponorogo;
132. Bupati Trenggalek;
133. Bupati Tulungagung;
134. Bupati Blitar;
135. Bupati Kediri;
136. Bupati Malang;
137. Bupati Lumajang;
138. Bupati Jember;
139. Bupati Banyuwangi;
140. Bupati Bondowoso;

141. Bupati Situbondo;
142. Bupati Probolinggo;
143. Bupati Pasuruan;
144. Bupati Siduarjo;
145. Bupati Mojokerto;
146. Bupati Jombang;
147. Bupati Nganjuk;
148. Bupati Madiun;
149. Pj. Bupati Magetan;
150. Bupati Ngawi;
151. Bupati Bojonegoro;
152. Bupati Tuban;
153. Bupati Lamongan;
154. Bupati Gresik;
155. Bupati Bangkalan;
156. Bupati Sampang;
157. Bupati Pamekasan;
158. Bupati Sumenep;
159. Bupati Pandeglang;
160. Bupati Lebak;
161. Bupati Tangerang;
162. Bupati Serang;
163. Bupati Jembrana;
164. Bupati Tabanan;
165. Bupati Badung;
166. Bupati Gianyar;
167. Bupati Klungkung;
168. Bupati Bangli;
169. Bupati Karangasem;
170. Bupati Buleleng;
171. Bupati Lombok Barat;
172. Bupati Lombok Tengah;
173. Bupati Lombok Timur;
174. Bupati Sumbawa;
175. Bupati Dompu;
176. Bupati Bima;
177. Bupati Sumbawa Barat;
178. Bupati Lombok Utara;
179. Bupati Kupang;
180. Bupati Timor Tengah Selatan;
181. Bupati Belu;
182. Bupati Alor;
183. Bupati Flores Timur;
184. Bupati Timor Tengah Utara;
185. Bupati Sikka;
186. Bupati Ende;
187. Bupati Ngada;
188. Bupati Manggarai;
189. Bupati Sumba Timur;

190. Bupati Sumba Barat;
191. Bupati Lembata;
192. Bupati Rote Ndao;
193. Bupati Manggarai Barat;
194. Bupati Nagekeo;
195. Bupati Sumba Tengah;
196. Bupati Sumba Barat Daya;
197. Bupati Manggarai Timur;
198. Bupati Sabu Raijua;
199. Bupati Malaka;
200. Bupati Kotawaringin Timur;
201. Bupati Kotawaringin Barat;
202. Bupati Kapuas;
203. Bupati Barito Selatan;
204. Pj. Bupati Barito Utara;
205. Bupati Katingan;
206. Bupati Seruyan;
207. Bupati Sukamara;
208. Pj. Bupati Lamandau;
209. Bupati Gunung Mas;
210. Bupati Pulang Pisau;
211. Bupati Murung Raya;
212. Bupati Barito Timur;
213. Bupati Tanah Laut;
214. Bupati Kotabaru;
215. Bupati Banjar;
216. Bupati Barito Kuala;
217. Bupati Tapin;
218. Bupati Hulu Sungai Selatan;
219. Bupati Suu Sungai Tengah;
220. Bupati Hulu Sungai Utara;
221. Bupati Tabalong;
222. Bupati Tanah Bumbu;
223. Bupati Balangan;
224. Bupati Paser;
225. Bupati Kutai Kartanegara;
226. Bupati Berau;
227. Bupati Kutai Barat;
228. Bupati Kutai Timur;
229. Bupati Penajam Paser Utara;
230. Bupati Mahakam Ulu;
231. Bupati Bulungan;
232. Bupati Malinau;
233. Bupati Nunukan;
234. Bupati Tanatidung;
235. Bupati Banggai;
236. Bupati Poso;
237. Bupati Donggala;
238. Bupati Toli Toli;

239. Bupati Buol;
240. Bupati Morowali;
241. Bupati Banggai Kepulauan;
242. Bupati Parigi Moutong;
243. Bupati Tojo Una Una;
244. Bupati Sigi;
245. Bupati Banggai Laut;
246. Bupati Morowali Utara;
247. Bupati Kepulauan Selayar;
248. Bupati Bulukumba;
249. Bupati Bantaeng;
250. Pj. Bupati Jeneponto;
251. Bupati Takalar;
252. Bupati Gowa;
253. Bupati Sinjai;
254. Bupati Bone;
255. Bupati Maros;
256. Bupati Pangkajene Dan Kepulauan;
257. Bupati Barru;
258. Bupati Soppeng;
259. Bupati Wajo;
260. Bupati Sidenreng Rappang;
261. Bupati Pinrang;
262. Bupati Enrekang;
263. Bupati Luwu;
264. Bupati Tana Toraja;
265. Bupati Luwu Utara;
266. Bupati Luwu Timur;
267. Bupati Toraja Utara;
268. Bupati Kolaka;
269. Bupati Konawe;
270. Bupati Muna;
271. Bupati Buton;
272. Bupati Konawe Selatan;
273. Bupati Bombana;
274. Bupati Wakatobi;
275. Bupati Kolaka Utara;
276. Bupati Konawe Utara;
277. Bupati Buton Utara;
278. Bupati Kolaka Timur;
279. Bupati Konawe Kepulauan;
280. Bupati Muna Barat;
281. Bupati Buton Tengah;
282. Bupati Buton Selatan;
283. Bupati Maluku Tengah;
284. Bupati Maluku Tenggara;
285. Bupati Kepulauan Tanimbar;
286. Pj. Bupati Buru;
287. Bupati Seram Bagian Timur;

288. Bupati Seram Bagian Barat;
289. Bupati Kepulauan Aru;
290. Bupati Maluku Barat Daya;
291. Bupati Buru Selatan;
292. Bupati Halmahera Barat;
293. Bupati Halmahera Utara;
294. Bupati Halmahera Tengah;
295. Bupati Halmahera Selatan;
296. Bupati Kepulauan Sula;
297. Bupati Halmahera Timur;
298. Bupati Pulau Morotai;
299. Bupati Pulau Taliabu;
300. Bupati Maybrat;
301. Bupati Raja Ampat;
302. Bupati Sorong;
303. Bupati Sorong Selatan;
304. Bupati Tambrauw;
305. Wali Kota Padang;
306. Wali Kota Solok;
307. Wali Kota Sawahlunto;
308. Wali Kota Padang Panjang;
309. Wali Kota Bukittinggi;
310. Wali Kota Payakumbuh;
311. Wali Kota Pariaman;
312. Wali Kota Pekanbaru;
313. Wali Kota Dumai;
314. Wali Kota Palembang;
315. Wali Kota Pagar Alam;
316. Wali Kota Lubuk Linggau;
317. Wali Kota Prabumulih;
318. Wali Kota Bandar Lampung;
319. Wali Kota Metro;
320. Wali Kota Batam;
321. Wali Kota Tanjung Pinang;
322. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat;
323. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara;
324. Wali Kota Administrasi Jakarta Barat;
325. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan;
326. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
327. Wali Kota Bogor;
328. Wali Kota Sukabumi;
329. Wali Kota Bandung;
330. Wali Kota Cirebon;
331. Wali Kota Bekasi;
332. Wali Kota Depok;
333. Wali Kota Cimahi;
334. Wali Kota Tasikmalaya;
335. Wali Kota Banjar;
336. Wali Kota Magelang;
337. Wali Kota Surakarta;
338. Wali Kota Salatiga;

339. Wali Kota Semarang;
340. Wali Kota Pekalongan;
341. Wali Kota Tegal;
342. Wali Kota Yogyakarta;
343. Wali Kota Kediri;
344. Wali Kota Blitar;
345. Wali Kota Malang;
346. Wali Kota Probolinggo;
347. Wali Kota Pasuruan;
348. Wali Kota Mojokerto;
349. Wali Kota Madiun;
350. Wali Kota Surabaya;
351. Wali Kota Batu;
352. Wali Kota Tangerang;
353. Wali Kota Cilegon;
354. Wali Kota Serang;
355. Wali Kota Tangerang Selatan;
356. Wali Kota Denpasar;
357. Wali Kota Mataram;
358. Wali Kota Bima;
359. Wali Kota Kupang;
360. Wali Kota Palangkaraya;
361. Wali Kota Banjarmasin;
362. Wali Kota Banjarbaru;
363. Wali Kota Balikpapan;
364. Wali Kota Samarinda;
365. Wali Kota Bontang;
366. Wali Kota Tarakan;
367. Wali Kota Palu;
368. Wali Kota Makassar;
369. Wali Kota Parepare;
370. Pj. Wali Kota Palopo;
371. Wali Kota Kendari;
372. Wali Kota Bau Bau;
373. Wali Kota Ambon;
374. Wali Kota Tual;
375. Wali Kota Ternate;
376. Wali Kota Tidore Kepulauan;
377. Wali Kota Sorong.

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,



Dr. Drs. Bahtiar, M. Si

DAFTAR LAMPIRAN

1. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat:
<https://tinyurl.com/IHal-Sumbar2025>;
2. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau:
<https://tinyurl.com/IHal-Riau2025>;
3. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan:
<https://tinyurl.com/IHal-Sumsel2025>;
4. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung:
<https://tinyurl.com/IHal-Lampung2025>;
5. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau:
<https://tinyurl.com/IHal-Kepri2025>;
6. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta:
<https://tinyurl.com/IHal-DKI2025>;
7. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat:
<https://tinyurl.com/IHal-Jabar2025>;
8. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah:
<https://tinyurl.com/IHal-Jateng2025>;
9. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:
<https://tinyurl.com/IHal-DIY2025>;
10. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur:
<https://tinyurl.com/IHal-Jatim2025>;
11. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten:
<https://tinyurl.com/IHal-Banten2025>;
12. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali:
<https://tinyurl.com/IHal-Bali2025>;
13. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat:
<https://tinyurl.com/IHal-NTB2025>;
14. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur:
<https://tinyurl.com/IHal-NTT2025>;
15. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah:
<https://tinyurl.com/IHal-Kalteng2025>;
16. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan:
<https://tinyurl.com/IHal-Kalsel2025>;
17. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur:
<https://tinyurl.com/IHal-Kaltim2025>;
18. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara:
<https://tinyurl.com/IHal-Kaltara2025>;
19. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah:
<https://tinyurl.com/IHal-Sulteng2025>;

20. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan:

<https://tinyurl.com/IHal-Sulsel2025>;

21. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara:

<https://tinyurl.com/IHal-Sultra2025>;

22. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku:

<https://tinyurl.com/IHal-Maluku2025>;

23. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara:

<https://tinyurl.com/IHal-Malukuutara2025>;

24. Link untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya:

<https://tinyurl.com/IHal-PBD2025>.

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,



Dr. Drs. Bahtiar, M. Si

Lampiran V
Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029
Nomor :000.7.6.1/1676/BADAN KESBANGPOL.SET
Tanggal : 11 Agustus 2025

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik															
Program 1 : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Outcome (Hasil) : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	100%	1.653.737.300	100%	1.885.499.300	100%	1.983.168.164	100%	2.097.398.650	100%	2.204.785.461	100%	2.322.961.962	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	2 Sub Kegiatan	1.653.737.300	4 Sub Kegiatan	1.885.499.300	4 Sub Kegiatan	1.983.168.164	4 Sub Kegiatan	2.097.398.650	4 Sub Kegiatan	2.204.785.462	4 Sub Kegiatan	2.322.961.963	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.620 Orang	85 Orang	500.000.000	200 Orang	50.000.000	230 Orang	52.590.000	280 Orang	55.619.184	300 Orang	58.466.886	300 Orang	61.600.711	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Output (Keluaran) : Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	N/A	0 Orang	-	90 Orang	500.000.000	100 Orang	525.900.000	120 Orang	556.191.840	150 Orang	584.668.862	150 Orang	616.007.113	
Sub Kegiatan 3 : Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Output (Keluaran) : Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	N/A	0 Dokumen	-	2 Dokumen	181.762.000	1 Dokumen	191.177.272	1 Dokumen	202.189.082	1 Dokumen	212.541.164	1 Dokumen	223.933.371	
Sub Kegiatan 4 : Pembentukan Paskibraka Output (Keluaran) : Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	N/A	52 Orang	1.153.737.300	52 Orang	1.153.737.300	60 Orang	1.213.500.892	60 Orang	1.283.398.544	60 Orang	1.349.108.549	60 Orang	1.421.420.767	
Program 2 : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Outcome (Hasil) : Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	N/A	100%	9.957.582.000	100%	10.287.880.000	100%	10.820.792.184	100%	11.444.069.814	100%	12.030.006.188	100%	12.674.814.520	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	N/A	2 Sub Kegiatan	9.957.582.000	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000	2 Sub Kegiatan	10.820.792.184	2 Sub Kegiatan	11.444.069.814	2 Sub Kegiatan	12.030.006.188	2 Sub Kegiatan	12.674.814.520	
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	21 Dokumen	11 Dokumen	9.868.672.000	11 Dokumen	9.937.880.000	11 Dokumen	10.452.662.184	11 Dokumen	11.054.735.526	11 Dokumen	11.620.737.984	11 Dokumen	12.243.609.541	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400 Orang	40 Orang	88.910.000	1.500 Orang	350.000.000	500 Orang	368.130.000	500 Orang	389.334.288	500 Orang	409.268.204	1.000 Orang	431.204.979	
Program 3 : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Outcome (Hasil) : Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	N/A	70%	9.779.956.500	71%	5.850.000.000	72%	6.153.030.000	73%	6.507.444.528	74%	6.840.625.688	75%	7.207.283.225	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	N/A	2 Sub Kegiatan	9.779.956.500	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000	2 Sub Kegiatan	6.153.030.000	2 Sub Kegiatan	6.507.444.528	2 Sub Kegiatan	6.840.625.688	2 Sub Kegiatan	7.207.283.225	
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	52 Dokumen	9.300.000.000	5 Dokumen	5.750.000.000	5 Dokumen	6.047.850.000	6 Dokumen	6.396.206.160	5 Dokumen	6.723.691.916	5 Dokumen	7.084.081.802	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	200 Orang	479.956.500	100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.180.000	150 Orang	111.238.368	100 Orang	116.933.772	150 Orang	123.201.423	
Program 4 : Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Outcome (Hasil) : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	N/A	100%	1.066.848.000	100%	377.820.900	100%	397.392.023	100%	420.281.803	100%	441.800.231	100%	465.480.724	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	N/A	1 Sub Kegiatan	1.066.848.000	1 Sub Kegiatan	377.820.900	1 Sub Kegiatan	397.392.923	1 Sub Kegiatan	420.281.803	1 Sub Kegiatan	441.800.231	1 Sub Kegiatan	465.480.724	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700 Orang	1.500 Orang	1.066.848.000	400 Orang	377.820.900	400 Orang	397.392.923	400 Orang	420.281.803	400 Orang	441.800.231	400 Orang	465.480.724	
Program 5 : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Outcome (Hasil) : Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	N/A	100%	3.326.440.000	100%	2.637.200.000	100%	2.773.806.960	100%	2.933.578.241	100%	3.083.777.447	100%	3.249.067.918	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	3 Sub Kegiatan	3.326.440.000	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000	3 Sub Kegiatan	2.773.806.960	3 Sub Kegiatan	2.933.578.241	3 Sub Kegiatan	3.083.777.447	3 Sub Kegiatan	3.249.067.918	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	50 Orang	334.240.000	70 Orang	350.000.000	70 Orang	350.000.000	70 Orang	400.000.000	70 Orang	400.000.000	1.500 Orang	565.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	2 Laporan	230.000.000	1 Laporan	20.000.000	3 Laporan	220.400.000	3 Laporan	220.808.000	3 Laporan	221.224.160	3 Laporan	221.648.643	
Sub Kegiatan 3.1 : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50 Paket	200.000.000	0 Paket	-	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	
Output (Keluaran) : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan															
Sub Kegiatan 3.2 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	6 Orang	30.000.000	10 Orang	20.000.000	5 Orang	20.400.000	5 Orang	20.808.000	5 Orang	21.224.160	5 Orang	21.648.643	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
Sub Kegiatan 3.3 : Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	50 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan															
Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	6 Laporan	1.038.700.000	6 Laporan	875.000.000	6 Laporan	892.500.000	6 Laporan	910.350.000	6 Laporan	928.557.000	6 Laporan	947.128.140	
Sub Kegiatan 4.1 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	350.000.000	3 Paket	350.000.000	4 Paket	357.000.000	4 Paket	364.140.000	4 Paket	371.422.800	4 Paket	378.851.256	
Output (Keluaran) : Tersedianya Bahan Logistik Kantor															
Sub Kegiatan 4.2 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	38.700.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	76.500.000	12 Paket	78.030.000	12 Paket	79.590.600	12 Paket	81.182.412	
Output (Keluaran) : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan															
Sub Kegiatan 4.3 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	51.000.000	12 Dokumen	52.020.000	12 Dokumen	53.060.400	12 Dokumen	54.121.608	
Output (Keluaran) : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan															
Sub Kegiatan 4.4 : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	102.000.000	12 Laporan	104.040.000	12 Laporan	106.120.800	12 Laporan	108.243.216	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu															
Sub Kegiatan 4.5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	255.000.000	12 Laporan	260.100.000	12 Laporan	265.302.000	12 Laporan	270.608.040	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Sub Kegiatan 4.6 : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	51.000.000	12 Dokumen	52.020.000	12 Dokumen	53.060.400	12 Dokumen	54.121.608	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	N/A	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	102.000.000	1 Laporan	104.040.000	1 Laporan	106.120.800	1 Laporan	108.243.216	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 5.1 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output (Keluaran) : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	0 Unit	-	7 Unit	100.000.000	7 Unit	102.000.000	7 Unit	104.040.000	7 Unit	106.120.800	7 Unit	108.243.216	
Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	1 Laporan	268.543.250	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Sub Kegiatan 6.1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output (Keluaran) : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	268.543.250	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	N/A	3 Laporan	495.400.000	3 Laporan	675.000.000	3 Laporan	688.500.000	3 Laporan	702.270.000	3 Laporan	716.315.400	3 Laporan	730.641.708	
Sub Kegiatan 7.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output (Keluaran) : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	400.000.000	22 Unit	350.000.000	15 Unit	357.000.000	15 Unit	364.140.000	15 Unit	371.422.800	15 Unit	378.851.256	
Sub Kegiatan 7.2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output (Keluaran) : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	95.400.000	25 Unit	75.000.000	25 Unit	76.500.000	25 Unit	78.030.000	25 Unit	79.590.600	25 Unit	81.182.412	
Sub Kegiatan 7.3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Output (Keluaran) : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	255.000.000	1 Unit	260.100.000	1 Unit	265.302.000	1 Unit	270.608.040	
JUMLAH				38.550.364.050		34.252.144.200		35.606.208.211		37.150.352.294		38.623.525.855		40.222.589.809	

Pembuat Tabel : 198911172025211040_rachmatsulistiyo

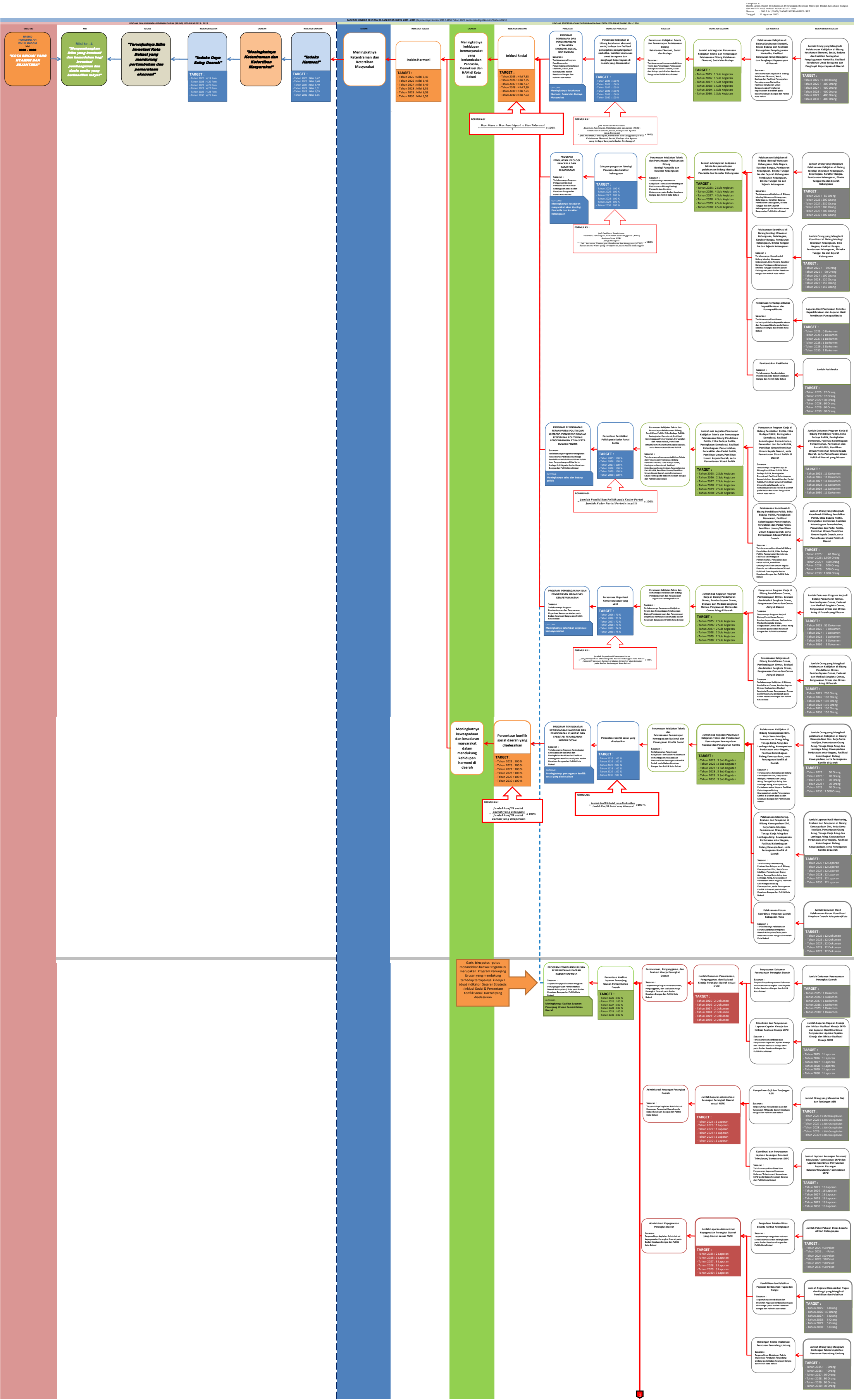
Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029
Nomor :000.7.6.1/1676/BADAN KESBANGPOL.SET
Tanggal : 11 Agustus 2025

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Indikator Tujuan : Indeks Harmoni Target 1. Tahun 2025 : 6,47 2. Tahun 2026 : 6,48 3. Tahun 2027 : 6,49 4. Tahun 2028 : 6,51 5. Tahun 2029 : 6,53 6. Tahun 2030 : 6,55	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi Indikator Tujuan : INKLUSI SOSIAL Target 1. Tahun 2025 : 7,63 2. Tahun 2026 : 7,65 3. Tahun 2027 : 7,67 4. Tahun 2028 : 7,69 5. Tahun 2029 : 7,71 6. Tahun 2030 : 7,73	<i>Program 1 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> Indikator Program : Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Target 1. Tahun 2025 : 100 % 2. Tahun 2026 : 100 % 3. Tahun 2027 : 100 % 4. Tahun 2028 : 100 % 5. Tahun 2029 : 100 % 6. Tahun 2030 : 100 %	GERAKAN KOBE CERDAS	<i>Terbangunnya unit pembelajaran, pencegahan dan penanganan Narkoba</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Sub Kegiata 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>
		<i>Program 2 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</i>	<i>Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat</i> Indikator Program : <i>Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan</i> Target 1. Tahun 2025 : 100 % 2. Tahun 2026 : 100 % 3. Tahun 2027 : 100 % 4. Tahun 2028 : 100 % 5. Tahun 2029 : 100 % 6. Tahun 2030 : 100 %	GERAKAN KOBE CERDAS	<i>Terbangunnya unit pembelajaran, pencegahan dan penanganan Narkoba</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Sub Kegiata 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				GERAKAN KOBE BERSINERGI	<i>Terciptanya kebebasan beribadah dan kerukunan kehidupan beragama yang semakin kondusif didukung peningkatan sarana dan prasarana beribadah secara proporsional sesuai kebutuhan</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>
		<i>Program 3 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	<i>Meningkatnya etika dan budaya politik</i> <i>Indikator Program :</i> <i>Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</i> <i>Target</i> <i>1. Tahun 2025 : 100 %</i> <i>2. Tahun 2026 : 100 %</i> <i>3. Tahun 2027 : 100 %</i> <i>4. Tahun 2028 : 100 %</i> <i>5. Tahun 2029 : 100 %</i> <i>6. Tahun 2030 : 100 %</i>	GERAKAN KOBE BERSINERGI	<i>Berkembangnya kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat bagi organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, keswadayaan masyarakat, profesi, dan berbagai komunitas yang ada</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>
							<i>Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		<i>Program 4 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan</i> <i>Indikator Program :</i> <i>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif</i> <i>Target</i> <i>1. Tahun 2025 : 70 %</i> <i>2. Tahun 2026 : 71 %</i> <i>3. Tahun 2027 : 72 %</i> <i>4. Tahun 2028 : 73 %</i> <i>5. Tahun 2029 : 74 %</i> <i>6. Tahun 2030 : 75 %</i>	<i>GERAKAN KOBE BERSINERGI</i>	<i>Berkembangnya kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat bagi organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, keswadayaan masyarakat, profesi, dan berbagai komunitas yang ada</i>	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	<i>Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>
							<i>Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>
	<i>Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah</i> <i>Indikator Sasaran :</i> <i>Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan</i> <i>Target</i> <i>1. Tahun 2025 : 100 %</i> <i>2. Tahun 2026 : 100 %</i> <i>3. Tahun 2027 : 100 %</i> <i>4. Tahun 2028 : 100 %</i> <i>5. Tahun 2029 : 100 %</i> <i>6. Tahun 2030 : 100 %</i>	<i>Program 5 (Langsung Urusan) :</i> <i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan</i> <i>Indikator Program :</i> <i>Persentase konflik sosial yang diselesaikan</i> <i>Target</i> <i>1. Tahun 2025 : 100 %</i> <i>2. Tahun 2026 : 100 %</i> <i>3. Tahun 2027 : 100 %</i> <i>4. Tahun 2028 : 100 %</i> <i>5. Tahun 2029 : 100 %</i> <i>6. Tahun 2030 : 100 %</i>	<i>GERAKAN KOBE MENARIK</i>	<i>Terciptanya iklim yang kondusif dengan kemudahan akses informasi, insentif penguat daya tarik investasi, dan kemudahan proses perijinan</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>

Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	SAPTA PROGRAM (GERAKAN KOBE)	SASARAN PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							<i>Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>
							<i>Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025 – 2029**

1. Proses Penyiapan Dokumen Evaluasi Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol tahun 2025 - 2029



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025 – 2029**

2. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol tahun 2025 - 2029

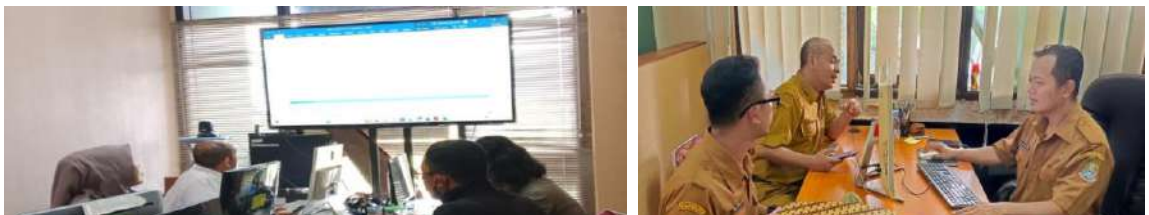


**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025 – 2029**

3. Proses Pelaksanaan Koordinasi / Konsultasi Lintas Sektoral dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol tahun 2025 – 2029



Bersama Tim Bappelitbangda Kota Bekasi
(Konsultasi terkait Perjenjangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kepala Daerah terpilih Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 dengan keterkaitan Tupoksi Badan Kesbangpol Kota Bekasi).



Bersama Tim Bappelitbangda Kota Bekasi dan Tim Ahli Penyusun RPJMD Kota Bekasi
(Konsultasi terkait Perjenjangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kepala Daerah terpilih Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 dengan keterkaitan Tupoksi Badan Kesbangpol Kota Bekasi).



Koordinasi / Konsultasi bersama Evaluator
ITKO Kota Bekasi terkait Dokumen Renstra
Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
Telepon (021) 89451761, Faksimile (021) 89451761
Laman bappelitbangda.bekasikota.go.id

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029
Nomor : 000.7.2.2/2989-BA/Bappelitbangda.PMM

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappelitbangda.

Adapun hasil verifikasi pada Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- KESATU : Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.
- KEDUA : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator, Target dan Pendanaan Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Berita Acara ini.
- KETIGA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyepakati,

Kepala Bappelitbangda
Kota Bekasi,

Drs. Dinar Faizal Badar
NIP. 19710115 199003 1 002

Kepala Badan Kesbangpol
Kota Bekasi,

Nesan Sujana S.T., M.T., CGCAE
NIP. 19740708 200212 1 007

LAMPIRAN I
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029
NOMOR : 000.7.2.2/2989-BA/Bappelitbangda.PMM
TANGGAL : 27 Agustus 2025

**TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025 – 2029**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 : "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat". Indikator Sasaran : "Indeks Harmoni" Target : 1. Tahun 2025 : 6,47 2. Tahun 2026 : 6,48 3. Tahun 2027 : 6,49 4. Tahun 2028 : 6,51 5. Tahun 2029 : 6,53 6. Tahun 2030 : 6,55	"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat".		"Indeks Harmoni"	6,47	6,48	6,49	6,51	6,53	6,55	
		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73	
		Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sekretaris Bakesbangpol Kota Bekasi,
Bappelitbangda Kota Bekasi

Yanka Perkasa, S.E., AAP., M.Ak
NIP. 19770421 200212 1 008

Sekretaris Bakesbangpol Kota Bekasi,

Yunan Albaehaqi, S.Sos, M.M.
NIP. 19710608 199003 1 001

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kota Bekasi,

Muhammad Arifin, S.IP
NIP. 19680210 199403 1 008

Menyetujui,

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi,

Drs. Agus Enap, M.Pd
NIP. 19690420 199603 1 005

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kota Bekasi,

Ratna Ningsih, S.AP, M.Si
NIP. 19680609 200701 2 011

Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kota Bekasi,

Muhammad Zainudin, S.H.
NIP. 19750106 200901 1 001

LAMPIRAN II
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029
NOMOR : 000.7.2.2/2989-BA/Bappelitbangda.PMM
TANGGAL : 27 Agustus 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik															
Program 1 : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Outcome (Hasil) : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	100%	1.653.737.300	100%	1.885.499.300	100%	1.983.168.164	100%	2.097.398.650	100%	2.204.785.461	100%	2.322.961.962	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	2 Sub Kegiatan	1.653.737.300	4 Sub Kegiatan	1.885.499.300	4 Sub Kegiatan	1.983.168.164	4 Sub Kegiatan	2.097.398.650	4 Sub Kegiatan	2.204.785.462	4 Sub Kegiatan	2.322.961.963	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.620 Orang	85 Orang	500.000.000	200 Orang	50.000.000	230 Orang	52.590.000	280 Orang	55.619.184	300 Orang	58.466.886	300 Orang	61.600.711	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Output (Keluaran) : Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	N/A	0 Orang	-	90 Orang	500.000.000	100 Orang	525.900.000	120 Orang	556.191.840	150 Orang	584.668.862	150 Orang	616.007.113	
Sub Kegiatan 3 : Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Output (Keluaran) : Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	N/A	0 Dokumen	-	2 Dokumen	181.762.000	1 Dokumen	191.177.272	1 Dokumen	202.189.082	1 Dokumen	212.541.164	1 Dokumen	223.933.371	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 4 : Pembentukan Paskibraka Output (Keluaran) : Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	N/A	52 Orang	1.153.737.300	52 Orang	1.153.737.300	60 Orang	1.213.500.892	60 Orang	1.283.398.544	60 Orang	1.349.108.549	60 Orang	1.421.420.767	
Program 2 : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Outcome (Hasil) : Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	N/A	100%	9.957.582.000	100%	10.287.880.000	100%	10.820.792.184	100%	11.444.069.814	100%	12.030.006.188	100%	12.674.814.520	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	N/A	2 Sub Kegiatan	9.957.582.000	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000	2 Sub Kegiatan	10.820.792.184	2 Sub Kegiatan	11.444.069.814	2 Sub Kegiatan	12.030.006.188	2 Sub Kegiatan	12.674.814.520	

BDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politk di Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politk, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politk di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	21 Dokumen	11 Dokumen	9.868.672.000	11 Dokumen	9.937.880.000	11 Dokumen	10.452.662.184	11 Dokumen	11.054.735.526	11 Dokumen	11.620.737.984	11 Dokumen	12.243.609.541	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politk, Etika Budaya Politk, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politk, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politk di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politk, Etika Budaya Politk, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politk, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400 Orang	40 Orang	88.910.000	1.500 Orang	350.000.000	500 Orang	368.130.000	500 Orang	389.334.288	500 Orang	409.268.204	1.000 Orang	431.204.979	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
Program 3 : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Outcome (Hasil) : Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	N/A	70%	9.779.956.500	71%	5.850.000.000	72%	6.153.030.000	73%	6.507.444.528	74%	6.840.625.688	75%	7.207.283.225	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	N/A	2 Sub Kegiatan	9.779.956.500	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000	2 Sub Kegiatan	6.153.030.000	2 Sub Kegiatan	6.507.444.528	2 Sub Kegiatan	6.840.625.688	2 Sub Kegiatan	7.207.283.225	
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	52 Dokumen	9.300.000.000	5 Dokumen	5.750.000.000	5 Dokumen	6.047.850.000	6 Dokumen	6.396.206.160	5 Dokumen	6.723.691.916	5 Dokumen	7.084.081.802	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	200 Orang	479.956.500	100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.180.000	150 Orang	111.238.368	100 Orang	116.933.772	150 Orang	123.201.423	
Program 4 : Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Outcome (Hasil) : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	N/A	100%	1.066.848.000	100%	377.820.900	100%	397.392.023	100%	420.281.803	100%	441.800.231	100%	465.480.724	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	N/A	1 Sub Kegiatan	1.066.848.000	1 Sub Kegiatan	377.820.900	1 Sub Kegiatan	397.392.923	1 Sub Kegiatan	420.281.803	1 Sub Kegiatan	441.800.231	1 Sub Kegiatan	465.480.724	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700 Orang	1.500 Orang	1.066.848.000	400 Orang	377.820.900	400 Orang	397.392.923	400 Orang	420.281.803	400 Orang	441.800.231	400 Orang	465.480.724	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
Program 5 : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Outcome (Hasil) : Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	N/A	100%	3.326.440.000	100%	2.637.200.000	100%	2.773.806.960	100%	2.933.578.241	100%	3.083.777.447	100%	3.249.067.918	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	3 Sub Kegiatan	3.326.440.000	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000	3 Sub Kegiatan	2.773.806.960	3 Sub Kegiatan	2.933.578.241	3 Sub Kegiatan	3.083.777.447	3 Sub Kegiatan	3.249.067.918	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	50 Orang	334.240.000	70 Orang	350.000.000	70 Orang	350.000.000	70 Orang	400.000.000	70 Orang	400.000.000	1.500 Orang	565.000.000	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	537.200.000	12 Laporan	534.480.000	12 Laporan	564.480.000	12 Laporan	610.080.000	12 Laporan	750.000.000	12 Laporan	750.000.000	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
serta Penanganan Konflik di Daerah															
Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Output (Keluaran) : Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	2.455.000.000	12 Dokumen	1.752.720.000	12 Dokumen	1.859.326.960	12 Dokumen	1.923.498.241	12 Dokumen	1.933.777.447	12 Dokumen	1.934.067.918	
Program 6 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Outcome (Hasil) : Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	12.765.800.250	100%	13.213.744.000	100%	13.478.018.880	100%	13.747.579.258	100%	14.022.530.840	100%	14.302.981.460	
Kegiatan 1 : Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	N/A	2 Dokumen	136.640.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	76.500.000	2 Dokumen	78.030.000	2 Dokumen	79.590.600	2 Dokumen	81.182.412	
Sub Kegiatan 1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Output (Keluaran) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	1 Dokumen	111.640.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	52.020.000	1 Dokumen	53.060.400	1 Dokumen	54.121.608	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output (Keluaran) : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.500.000	1 Laporan	26.010.000	1 Laporan	26.530.200	1 Laporan	27.060.804	
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	N/A	2 Laporan	10.596.517.000	2 Laporan	11.468.744.000	2 Laporan	11.498.118.880	2 Laporan	11.732.081.258	2 Laporan	11.970.722.880	2 Laporan	12.214.137.341	
Sub Kegiatan 2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output (Keluaran) : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.026 Orang / Bulan	1.142 Orang / Bulan	10.581.517.000	1.316 Orang / Bulan	11.453.744.000	1.316 Orang / Bulan	11.483.118.880	1.316 Orang / Bulan	11.717.081.258	1.316 Orang / Bulan	11.955.722.880	1.316 Orang / Bulan	12.199.137.341	
Sub Kegiatan 2.2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Output (Keluaran) : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	
Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	2 Laporan	230.000.000	1 Laporan	20.000.000	3 Laporan	220.400.000	3 Laporan	220.808.000	3 Laporan	221.224.160	3 Laporan	221.648.643	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 3.1 : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Output (Keluaran) : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50 Paket	200.000.000	0 Paket	-	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000	
Sub Kegiatan 3.2 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Output (Keluaran) : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	6 Orang	30.000.000	10 Orang	20.000.000	5 Orang	20.400.000	5 Orang	20.808.000	5 Orang	21.224.160	5 Orang	21.648.643	
Sub Kegiatan 3.3 : Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang Output (Keluaran) : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	50 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	
Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	6 Laporan	1.038.700.000	6 Laporan	875.000.000	6 Laporan	892.500.000	6 Laporan	910.350.000	6 Laporan	928.557.000	6 Laporan	947.128.140	
Sub Kegiatan 4.1 : Penyediaan Bahan Logistik Output (Keluaran) : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	350.000.000	3 Paket	350.000.000	4 Paket	357.000.000	4 Paket	364.140.000	4 Paket	371.422.800	4 Paket	378.851.256	
Sub Kegiatan 4.2 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output (Keluaran) : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	38.700.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	76.500.000	12 Paket	78.030.000	12 Paket	79.590.600	12 Paket	81.182.412	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 4.3 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan Output (Keluaran) : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	51.000.000	12 Dokumen	52.020.000	12 Dokumen	53.060.400	12 Dokumen	54.121.608	
Sub Kegiatan 4.4 : Fasilitasi Kunjungan Tamu Output (Keluaran) : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	102.000.000	12 Laporan	104.040.000	12 Laporan	106.120.800	12 Laporan	108.243.216	
Sub Kegiatan 4.5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output (Keluaran) : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	255.000.000	12 Laporan	260.100.000	12 Laporan	265.302.000	12 Laporan	270.608.040	
Sub Kegiatan 4.6 : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Output (Keluaran) : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	51.000.000	12 Dokumen	52.020.000	12 Dokumen	53.060.400	12 Dokumen	54.121.608	
Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	N/A	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	102.000.000	1 Laporan	104.040.000	1 Laporan	106.120.800	1 Laporan	108.243.216	
Sub Kegiatan 5.1 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output (Keluaran) : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	0 Unit	-	7 Unit	100.000.000	7 Unit	102.000.000	7 Unit	104.040.000	7 Unit	106.120.800	7 Unit	108.243.216	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai NSPK	N/A	1 Laporan	268.543.250	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Sub Kegiatan 6.1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output (Keluaran) : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	268.543.250	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	N/A	3 Laporan	495.400.000	3 Laporan	675.000.000	3 Laporan	688.500.000	3 Laporan	702.270.000	3 Laporan	716.315.400	3 Laporan	730.641.708	
Sub Kegiatan 7.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output (Keluaran) : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	400.000.000	22 Unit	350.000.000	15 Unit	357.000.000	15 Unit	364.140.000	15 Unit	371.422.800	15 Unit	378.851.256	
Sub Kegiatan 7.2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output (Keluaran) : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	95.400.000	25 Unit	75.000.000	25 Unit	76.500.000	25 Unit	78.030.000	25 Unit	79.590.600	25 Unit	81.182.412	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan 7.3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	255.000.000	1 Unit	260.100.000	1 Unit	265.302.000	1 Unit	270.608.040	
Output (Keluaran) : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
JUMLAH				38.550.364.050		34.252.144.200		35.606.208.211		37.150.352.294		38.623.525.855		40.222.589.809	

Menyetujui,

Kepala Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Bappelitbangda Kota Bekasi

Yanka Perkasa, S.E., AAP., M.Ak
NIP. 19770421 200212 1 008

Sekretaris Bakesbangpol
Kota Bekasi,

Yunan Albaehaqi, S.Sos, M.M.
NIP. 19710608 199003 1 001

Kepala Bidang Politik Dalam
Negeri Kota Bekasi,

Muhammad Arifin, S.IP
NIP. 19680210 199403 1 008

Kepala Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan
Kota Bekasi,

Drs. Agus Enap, M.Pd
NIP. 19690420 199603 1 005

Kepala Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa Kota Bekasi,

Ratna Ningsih, S.AP, M.Si
NIP. 19680609 200701 2 011

Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik
Kota Bekasi,

Muhammad Zainudin, S.H.
NIP. 19750106 200901 1 001